GCF
task force

MEMBANGUN EKONOMI HUTAN YANG BARU

Memajukan Aksi Iklim melalui Satuan Tugas Iklim dan Hutan Gubernur

Kontributor

Kami berterima kasih kepada mitra kami di Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia (NICFI) dan Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia (Norad) atas dukungan pendanaan dan kemitraan yang berkelanjutan dengan GCF Task Force. Informasi yang disajikan di sini sebagian besar diberikan secara langsung oleh para delegasi dari yurisdiksi anggota GCF Task Force, bersama dengan informasi tambahan dari rencana strategis yang dikembangkan melalui GCF Task Force dalam kerjasama dengan United Nations Development Program (UNDP). Sumber-sumber tambahan dicantumkan jika sesuai. Laporan ini dimaksudkan sebagai dokumen yang terus berkembang dan kami akan memperbaharuinya di halaman web kami ketika informasi baru tersedia - termasuk perkiraan yang lebih berkembang untuk kebutuhan dan peluang pendanaan. Setiap kesalahan atau kelalaian yang terjadi tidak disengaja, namun sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sekretariat GCF Task Force. Pembaruan yurisdiksi akan disertakan ketika tersedia.

Disponsori oleh

NICFI Norway's International Climate and Forest Initiative

Norad

Didukung oleh

UCLA School of Law Emmett Institute on Climate Change & the Environment

UCLA Institute of the Environment and Sustainability

University of Colorado Boulder
Institute of Behavioral Science

Dikembangkan oleh

GCF task force

pro natura sur

Mecanismos de Desarrollo Alternos

fundación natura

YAYASAN BUMI EKA LESTARI

NATURALEZA Y CULTURA INTERNACIONAL

Sekretariat Global

William Boyd, Jason Gray, Martha Gutierrez Fontes, Joan Koyama, Gabriel Penteado, Colleen Scanlan Lyons

Koordinator Negara

Syahrina Anggraini (Indonesia), Carlos Aragón (Brazil), Silvia Llamas (Meksiko), Fabiola Muñoz (Peru), dan Bruno Paladines (Ekuador), dengan dukungan dari Carmen Antelo (Bolivia), Pierre Encinas (Peru), dan Lorenzo Vargas (Kolombia)

Peta Yurisdiksi

Semua peta yurisdiksi telah dikontribusikan oleh CTrees, mitra GCF Task Force. Peta-peta ini dibuat dengan menggunakan metodologi mutakhir dari CTrees dan mendukung pendekatan yang konsisten untuk menilai data dan melacak kemajuan di seluruh jaringan GCF Task Force. Harap diperhatikan: Banyak negara dan yurisdiksi subnasional memiliki kumpulan data dan peta resmi mereka sendiri yang harus mereka gunakan untuk tujuan resmi. Pencantuman peta-peta CTrees tidak menyiratkan persetujuan dari pemerintah manapun.

ctrees
SEE THE FOREST & THE TREES

Gugus Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan

Selama lima belas tahun terakhir, Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (Governors' Climate and Forests Task Force / GCF Task Force) telah muncul sebagai aliansi global yang unik dan terdiri dari berbagai yurisdiksi terkemuka di tingkat subnasional yang bekerja untuk mencapai solusi yang tahan lama untuk mengatasi deforestasi hutan tropis dan perubahan iklim. Pemerintah daerah merupakan aktor penting dalam mengimplementasikan sebagian besar agenda kebijakan iklim internasional, dan Satuan Tugas GCF menyediakan platform penting untuk memotivasi, mendukung, menghubungkan, dan meningkatkan upaya-upaya subnasional di seluruh wilayah tropis.

Saat ini, Gugus Tugas GCF merupakan jaringan **pemerintah sub pemerintah sub-nasional terbesar di dunia yang berfokus pada hutan dan iklim**, dengan **43 anggota dari 11 negara** yang mewakili lebih dari sepertiga hutan tropis dunia. Ini termasuk seluruh hutan Amazon di Brasil, sebagian besar hutan Amazon di Peru, lebih dari 60% hutan tropis di Meksiko, dan lebih dari 60% hutan di Indonesia. Kami bekerja sama dengan para **gubernur, pegawai negeri sipil, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan mitra utama lainnya, termasuk organisasi konservasi**, pemimpin sektor swasta, dan akademisi, untuk mengurangi deforestasi dan emisi gas rumah kaca tropis sekaligus memajukan ekonomi rendah karbon dan pembangunan berbasis hutan yang berkelanjutan.

Seiring dengan perjalanan 15 tahun ke depan, kami berupaya memperkuat kemitraan yang ada dan menciptakan kemitraan baru yang akan memfasilitasi investasi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung para anggota, komunitas, dan mitra kami dalam meningkatkan dan memperluas dampaknya.

Misi

Memberdayakan para pemimpin negara bagian dan provinsi untuk mengimplementasikan program- program yurisdiksi inovatif yang melindungi hutan tropis dan mempromosikan pembangunan rendah emisi. Kami menghubungkan para pemimpin ini dengan para mitra dan pemangku kepentingan yang mendukung upaya ini-dari pelaku sektor swasta hingga Masyarakat Adat dan pemimpin masyarakat setempat. Kami bekerja untuk membuka peluang keuangan untuk mendukung negara bagian dan provinsi dalam kerja keras mereka melindungi hutan dan mengatasi perubahan iklim. Kami melacak dampak dan kinerja dari tindakan-tindakan utama di tingkat negara bagian dan provinsi untuk memahami bagaimana kami dapat memajukan dan meningkatkan tindakan untuk hutan dan iklim.

Asal-usul Satuan Tugas GCF

Satuan Tugas GCF tumbuh dari KTT Iklim Global Gubernur Arnold Schwarzenegger yang pertama yang diadakan di Los Angeles pada tahun 2008. Sembilan Gubernur dari Brasil, Indonesia, dan Amerika Serikat hadir dalam KTT tersebut untuk menandatangani Nota Kesepahaman yang berkomitmen untuk berkolaborasi dalam isu-isu kehutanan dan iklim. Pada musim semi berikutnya, di kota Belem, negara bagian Pará, Brasil, Satuan Tugas GCF secara resmi diluncurkan dengan sepuluh anggota pendiri: California, Wisconsin, Illinois (AS), Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará (Brasil), Aceh, dan Papua (Indonesia).

Kredit: Sekretariat Global Gugus Tugas GCF

Sekretariat Gugus Tugas GCF

Gugus Tugas GCF didukung oleh Sekretariat global yang memfasilitasi pekerjaan yang terjadi di negara-negara anggota dan provinsi. Sekretariat memberikan pengawasan administratif, menghubungkan para anggota dengan peluang kemitraan dan membantu menjalankan visi strategis mereka, serta memimpin upaya penggalangan dana untuk GCF Task Force. Sekretariat bertempat di University of California, Los Angeles (UCLA) Institute of the Environment and Sustainability dan Emmett Institute on Climate Change and the Environment di UCLA School of Law, bekerja sama dengan Institute of Behavioral Science di University of Colorado Boulder (CU Boulder), serta kantor-kantor koordinasi di tingkat regional seperti di Brasil, Ekuador, Indonesia, Meksiko, dan Peru. UCLA dan CU Boulder memberikan kesempatan untuk menjalin hubungan dan kolaborasi di berbagai departemen lingkungan dan kebijakan.

Daftar Isi

Pendahuluan 3

Bolivia **12**
- Pando 14
- Santa Cruz 14
- Tarija 15

Brasil **16**
- Acre 19
- Amapá 19
- Amazonas 20
- Maranhão 20
- Mato Grosso 21
- Pará 22
- Rondônia 22
- Roraima 22
- Tocantins 23

Kolombia **24**
- Caquetá 24

Côte d'Ivoire **26**
- Bélier 27
- Dengan berani 27

Ekuador **30**
- Morona Santiago 31
- Pastaza 32
- Zamora Chinchipe 33

Indonesia **34**
- Aceh 38
- Kalimantan Tengah 38
- Kalimantan Timur 39
- Kalimantan Utara 40
- Kalimantan Barat 40
- Papua 41
- Papua Barat 41

Meksiko **42**
- Campeche 44
- Chiapas 44
- Jalisco 45
- Oaxaca 46
- Quintana Roo 46
- Tabasco 47
- Yucatán 47

Nigeria **48**
- Negara Bagian Lintas Sungai 49

Peru **50**
- Amazonas 53
- Huánuco 53
- Loreto 54
- Bunda Allah (Madre de Dios) 54
- Piura 55
- San Martín 55
- Ucayali 56

Kolaborasi Lintas Batas **59**

Terima kasih untuk masa lalu dan saat ini pendukung dan mitra teknis **62**

"Gugus Tugas GCF telah menjadi forum utama untuk mempertemukan perwakilan dari pemerintah dan masyarakat adat untuk membahas pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan tropis, dengan ilmu pengetahuan dan manfaat lokal sebagai landasan untuk mendukung pemahaman bersama."

RAJINDER SAHOTA

Wakil Pejabat Eksekutif, Dewan Sumber Daya Udara California

Foto arsip 25 November 2019, jalan raya BR-163 membentang di antara Hutan Nasional Tapajos, kiri, dan ladang kedelai di Belterra, negara bagian Para, Brasil. (AP Photo/Leo Correa, File)

Pendahuluan

Ketika dunia bertemu melalui konferensi dan pertemuan puncak iklim internasional untuk membahas komitmen global, desain pasar, dan janji keuangan tingkat tinggi, banyak masyarakat di Global South - khususnya di negara bagian dan provinsi hutan tropis - hanya melihat sedikit sekali dari janji-janji internasional tersebut yang terwujud. Apakah kita berbicara tentang peningkatan komitmen rantai pasokan perusahaan, janji pembiayaan, pertukaran utang dengan alam, atau upaya pasar karbon sukarela, kenyataan yang nyata adalah bahwa **insentif ekonomi yang mendorong deforestasi hutan tropis** - berlanjutnya pembukaan lahan berskala besar untuk peternakan dan pertanian serta ekstraksi minyak, gas, emas, kayu, kobalt, dan sumber daya lainnya - **terus mengancam bukan hanya kehidupan masyarakat tersebut, namun juga seluruh planet ini.**

Laporan terbaru dari World Resources Institute tentang Forest Pulse1 menemukan bahwa daerah tropis kehilangan hutan hujan primer 10% lebih banyak pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, meskipun ada komitmen di tingkat internasional, nasional, subnasional, dan perusahaan. Laporan tersebut juga menemukan bahwa emisi dari deforestasi hutan tropis setara dengan emisi dari India setiap tahunnya - yang berarti hutan tropis merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia. Tekanan terhadap hutan semakin meningkat bahkan ketika hutan menyusut, yang berarti kita perlu meningkatkan intervensi dan pembiayaan, di setiap tingkat.

Sementara negara-negara di belahan dunia Utara berfokus pada keadilan bagi pekerja minyak dan gas serta mengembangkan peraturan, insentif, dan kebijakan untuk mendorong investasi di bidang energi yang lebih bersih, transportasi, dan pekerjaan yang lebih ramah lingkungan, masyarakat di belahan dunia Selatan tidak melihat tindak lanjut yang sama dalam memberikan alternatif ekonomi yang serius terhadap status quo. **Tanpa dukungan finansial berskala besar dan berkelanjutan, peralihan dari ekonomi eks- traktif ke ekonomi hutan baru yang lebih berkelanjutan di daerah tropis akan tetap menjadi sebuah cita-cita, dan bukan sebuah pencapaian. Dan, keadaan darurat iklim dan keanekaragaman hayati yang kita hadapi bersama akan semakin memburuk.**[2]

Selain itu, ketika pemerintah nasional berganti, kita sudah terlalu sering melihat kepentingan politik dan ekonomi lebih diutamakan daripada agenda iklim dan hutan, terutama setelah pemilihan umum yang penuh perdebatan. Ketergantungan penuh pada pemerintah nasional menimbulkan risiko besar bagi kemajuan kebijakan dan implementasi serta melewatkan peluang intervensi yang sangat penting. Pemerintah daerah - termasuk pegawai negeri sipil yang sehari-hari bekerja di kekuasaan di seluruh adminis-

1 Analisis Terbaru mengenai Hutan Global & Kehilangan Tutupan Pohon | Global Forest Review (wri.org)

2 Penilaian Deklarasi Hutan 2023 menekankan bahwa dana publik dan swasta yang berkomitmen untuk membantu memerangi deforestasi hutan tropis saat ini masih sangat kecil dibandingkan dengan dana yang dibutuhkan dan dana yang disalurkan untuk investasi global lainnya. Lihat Bagian Penilaian Deklarasi Hutan. (2023). Keluar jalur dan tertinggal: Menelusuri kemajuan tujuan hutan 2030. Climate Focus (koordinator dan editor). Dapat diakses di www.forestdeclaration.org.

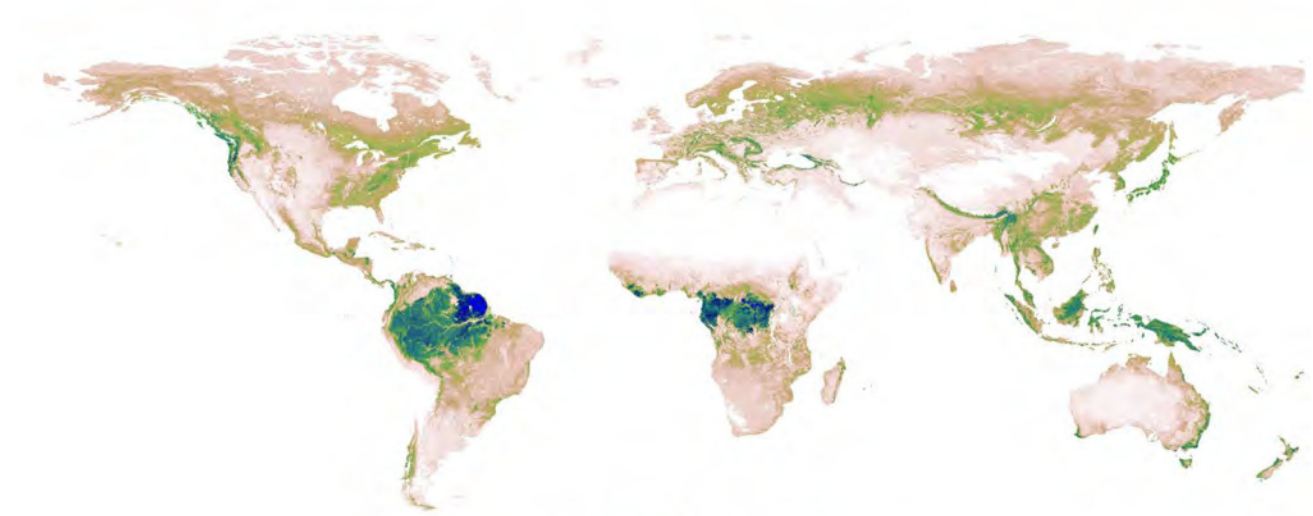

Biomassa hutan global dalam MgCO2 /ha. Dihasilkan oleh CTrees.

trasi politik - benar-benar penting. Bahkan, Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim mengakui bahwa tindakan dari pemerintah daerah dan aliansi regional sangat penting untuk mengimplementasikan tujuan Perjanjian Paris dan tujuan iklim secara lebih luas.3 Dan, Panel Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) mencatat bahwa "semakin banyak aktor daerah yang juga mempengaruhi pemerintah nasional dan internasional mereka melalui upaya lobi yang meminta mereka untuk mengadopsi tujuan iklim yang lebih ambisius dan memberikan lebih banyak dukungan untuk upaya mitigasi GRK sub-nasional.[4]"

Kredit: Sekretariat Global GCF Task Force

Keunggulan Komparatif Kepemimpinan Pemerintah Daerah

Melindungi hutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca dalam skala besar mengharuskan kita untuk mengatasi fragmentasi politik dan hukum di berbagai tingkat pemerintahan, meningkatkan insentif dan dukungan bagi para pemimpin politik, pegawai negeri sipil, dan masyarakat untuk fokus pada alternatif penggunaan hutan dan lahan yang berkelanjutan, dan membangun kapasitas kelembagaan di seluruh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendorong perubahan yang transformatif.

Sebagai jaringan global terbesar pemerintah subnasional yang berfokus pada agenda iklim dan hutan, dengan 43 anggota pemerintah negara bagian dan provinsi (mencakup 11 negara) yang berada di garis depan dalam krisis iklim, keanekaragaman hayati, dan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar negara di belahan dunia Selatan saat ini, **Hutan Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan (Governors' Climate and Forests Task Force/GCF Task Force) menawarkan sebuah platform yang unik dan telah teruji dalam menangani ketidaksetaraan yang sedang berlangsung di tingkat subnasional.**

3 Lihat misalnya, Pemerintah Daerah dan Aliansi Regional Sangat Penting untuk Menerapkan Paris | UNFCCC (2016).

4 Lihat Perubahan Iklim 2022: Mitigasi Perubahan Iklim. Kontribusi Kelompok Kerja III untuk Laporan Penilaian Keenam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, IPCC, 2022. Tersedia di IPCC_AR6_WGIII_FullReport.pdf.

Kami bekerja di lebih dari sepertiga hutan tropis dunia.

Kami menyemai *persatuan dan dukungan di antara para gubernur dan staf mereka*, serta memanfaatkan dan *memobilisasi mereka untuk bertindak demi agenda hutan dan iklim.*

Kami bekerja sangat erat dengan *mitra-mitra utama* di lapangan dalam yurisdiksi kami - *Masyarakat Adat, masyarakat tradisional dan lokal, masyarakat sipil dan bisnis, serta pemerintah nasional, lembaga multilateral dan antar negara, dan akademisi.*

Selain itu, kami memastikan *bahwa platform* ini *tersedia bagi para mitra dan pelaku baru untuk terlibat langsung* dengan pemerintah daerah dan masyarakat di yurisdiksi anggota kami.

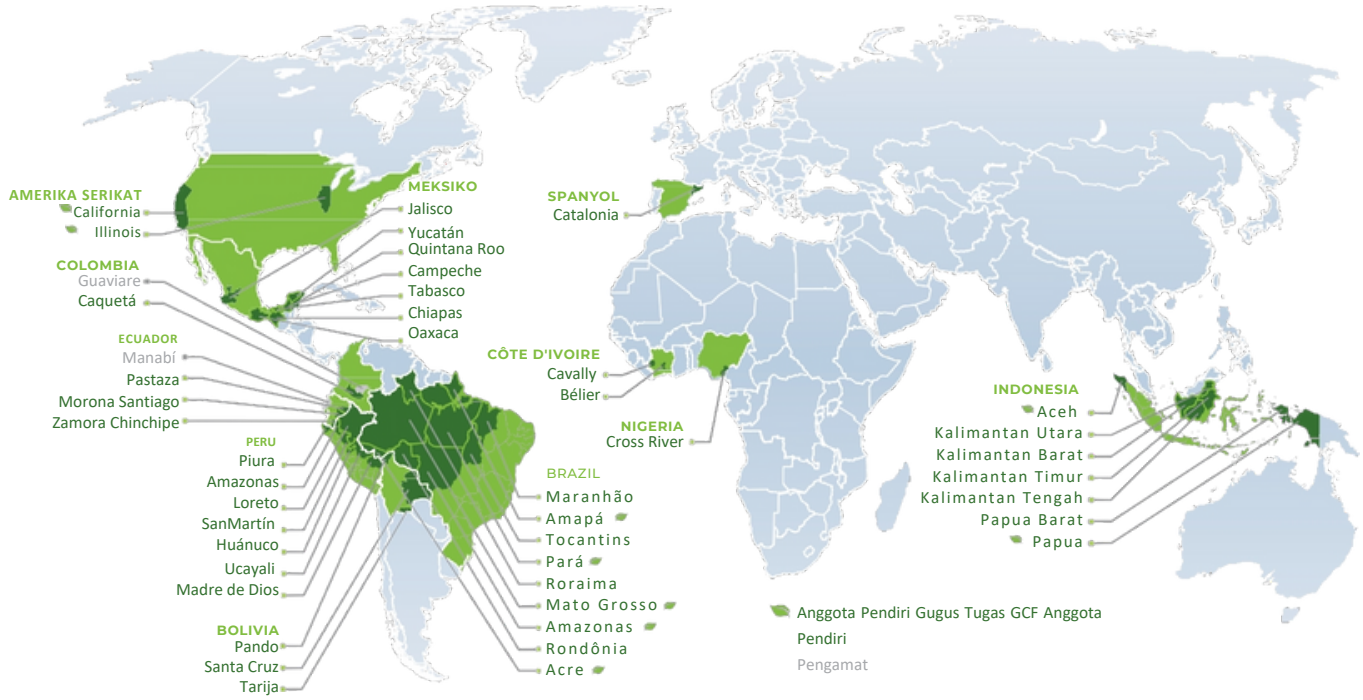

Kredit: Sekretariat Global Gugus Tugas GCF

Sederhananya, **GCF Task Force memiliki jari pada denyut nadi aksi pemerintah daerah di beberapa wilayah hutan terpenting di dunia**, dan kami mencari mitra untuk membantu kami membangun dan memperluas kesuksesan kami selama lima belas tahun.

Bagaimana Kami Bekerja

Seperti apa hal ini dalam praktiknya

MASYARAKAT DAN KOMUNITAS

Membangun kapasitas pemerintah negara bagian dan mitra masyarakat untuk menciptakan ekonomi hutan baru yang akan mengatasi akar penyebab deforestasi di negara bagian dan provinsi hutan tropis.

PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN INOVASI

Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi canggih dan perangkat data untuk mengurangi deforestasi, memantau dampak, menerapkan inovasi yang sesuai dengan konteks strategi, dan mendukung upaya pengelolaan lahan.

KEUANGAN, INVESTASI, DAN SEKTOR SWASTA

Memperluas kemitraan subnasional dengan perusahaan, bank, pengusaha, filantropi, dan sumber-sumber dukungan lainnya untuk meningkatkan pendanaan iklim dan pembangunan yang mendukung kegiatan konservasi dan pembangunan hutan yang terintegrasi.

TATA KELOLA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Merancang dan mengimplementasikan hukum dan kebijakan untuk memajukan ekonomi hutan baru, melestarikan hutan, memajukan dan melindungi hak-hak masyarakat adat, serta menciptakan kondisi untuk investasi jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan di yurisdiksi hutan tropis.

Kami Memfasilitasi Kepemimpinan dan Keterlibatan Politik oleh:

- Mendorong partisipasi aktif para pemimpin pemerintahan di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- Mendorong pertukaran pengalaman antara para pemimpin politik di seluruh pemerintahan, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat adat dan lokal.
- Mendukung koherensi dalam strategi iklim dan hutan di antara "kelompok" negara bagian dan regional, seperti Amazon di Brasil dan Peru, serta di seluruh Indonesia, untuk mendorong kohesi dan solidaritas di antara para anggota dan memungkinkan keselarasan yang lebih baik dengan proses-proses nasional.
- Bekerja melalui strategi-strategi seperti: pertukaran pengetahuan perubahan antara pengacara negara bagian tentang model undang-undang dan peraturan iklim; dukungan ahli dalam memahami dinamika pasar karbon yang sedang berkembang; implementasi dan penilaian hak-hak masyarakat adat; penerapan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Kolaborasi dan Kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat Adat, dan Masyarakat Setempat; dan studi percontohan bioekonomi.

Kami Membangun Kapasitas dan Mendukung Implementasi Kebijakan oleh:

- Memperkuat kapasitas para Gubernur, Menteri Lingkungan Hidup, pegawai negeri sipil, dan mitra masyarakat sipil untuk mengimplementasikan agenda hutan dan iklim di pemerintahan mereka dan di luarnya.
- Memetakan kapasitas implementasi anggota Satuan Tugas GCF, mendukung pengembangan rencana investasi berskala yurisdiksi, mengidentifikasi dan menilai hambatan dan peluang implementasi di masing-masing yurisdiksi.
- Menciptakan peluang pembelajaran sejawat dan memfasilitasi bantuan teknis melalui lokakarya, webinar, dan studi lapangan yang ditargetkan untuk mengatasi tantangan dan keberhasilan implementasi.
- Mendorong komitmen pejabat publik terhadap isu-isu lingkungan dan iklim di dalam dan di luar yurisdiksi mereka, yang berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan dan program terkait.

Kami memobilisasi sumber daya keuangan dengan:

- Mendukung negara anggota dan provinsi, serta masyarakat, dalam mencari pendanaan dan investasi untuk program-program pemanfaatan hutan dan lahan yang berkelanjutan.
- Mengidentifikasi kesenjangan anggaran, memetakan solusi untuk membuka sumber daya dari sumber publik dan swasta, mencari kemitraan investasi dengan pelaku rantai pasokan dan pasar sukarela dan kepatuhan yang baru muncul terkait dengan REDD+, serta menghubungkan anggota dengan mitra dan proses keuangan.
- Menyelaraskan negara-negara anggota dan provinsi di sekitar mitigasi untuk mendedikasikan dan memberikan porsi yang substansial dari pasar karbon dan dana iklim lainnya untuk mendukung upaya perlindungan hutan masyarakat adat dan masyarakat lokal.
- Mendukung negara anggota dan provinsi untuk memastikan sumber daya keuangan mengalir untuk mendukung strategi penggunaan hutan dan lahan yang berkelanjutan, sehingga mempromosikan ekonomi hutan baru yang didasarkan pada mata pencaharian ekonomi yang berkelanjutan, konservasi hutan, dan mitigasi perubahan iklim.

Kami Bekerja untuk Memasukkan Hak-Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLC) oleh:

- Memfasilitasi upaya-upaya di yurisdiksi yang ditargetkan dan daerah-daerah untuk memasukkan hak-hak, prinsip-prinsip, dan

Komite Global Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Dimulai pada tahun 2016, Komite Global Satgas GCF untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dibentuk untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dengan Masyarakat Adat dan pemimpin tingkat komunitas lokal. Komite Global ini mengadakan pertemuan secara rutin di acara-acara iklim dan hutan di tingkat nasional dan juga di wilayah-wilayah kerja GCF. Komite ini menyelaraskan kebijakan umum dan tujuan-tujuan advokasi serta berfungsi sebagai platform untuk berbagi strategi sukses untuk kemitraan pemerintah-masyarakat yang efektif dan tahan lama. Komite Global terdiri dari perwakilan negara bagian dan provinsi anggota GCF Task Force, pemimpin masyarakat adat dan lokal dari masing-masing wilayah, dan perwakilan dari organisasi global seperti Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques dan Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Komite Global mengimplementasikan rencana kerja dan tindakan untuk mendukung komite regional dalam Satuan Tugas GCF, mempromosikan Pelaksanaan Gugus Tugas GCF Prinsip-Prinsip Panduan, dan memastikan suara dan kepemimpinan Masyarakat Adat dan komunitas lokal menjadi yang terdepan dan utama dalam Gugus Tugas GCF. Komite Global telah mengembangkan proposal pendanaan bagi para mitra yang tertarik untuk mendukung kerja-kerja GCF secara langsung.

Kredit foto atas/bawah: Sekretariat Global Gugus Tugas GCF

- ertisipasi IPLC ke dalam kebijakan pemerintah untuk penggunaan hutan dan lahan yang berkelanjutan.
- Memperkuat komite IPLC global dan regional yang terdiri dari perwakilan pemerintah, masyarakat adat, dan masyarakat lokal.[5] Lihat kotak panggilan di Komite Global.
- Memprioritaskan dan memetakan hambatan bagi pemerintah untuk memasukkan hak-hak ini.
- Memajukan pendekatan inovatif dalam yurisdiksi tertentu untuk memasukkan dan melindungi hak-hak ini.
- Mempromosikan kemitraan strategis dan pembelajaran sebaya antara negara anggota dan provinsi dengan IPLC.
- Mempromosikan dialog antara pemerintah dan para pemimpin IPLC untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan saling memahami, yang berkontribusi pada kebijakan dan program penggunaan hutan dan lahan yang inklusif dan efektif.

Singkatnya, pendekatan kami sebagai sebuah jaringan adalah untuk mendorong proses yang terintegrasi dan kolaboratif dalam menangani isu-isu penting terkait iklim, hutan, dan masyarakat, memaksimalkan dampak dan tindakan positif di negara bagian dan provinsi, serta di masyarakat.

5 *Lihat* Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal - Satuan Tugas GCF (gcftf.org)

Garis Waktu Komitmen Utama

Pada tanggal 11 Agustus 2014 di Acre, Brasil, para gubernur dari seluruh dunia yang tergabung dalam Satuan Tugas GCF mengesahkan Deklarasi Rio Branco, berkomitmen untuk mengurangi deforestasi di negara bagian dan provinsi mereka hingga 80% pada tahun 2020, dengan syarat bahwa pendanaan yang memadai, mencukupi, dan berbasis kinerja jangka panjang tersedia. Meskipun tujuan pendanaan maupun pengurangan yang dihasilkan tidak tercapai, Deklarasi Rio Branco menetapkan tahap untuk penyelarasan kerangka kebijakan yang berkelanjutan untuk jaringan yang sedang berkembang ini dan komitmen pertama untuk memastikan kemitraan yang lebih efektif dengan dan bagian substansial dari dana pembayaran untuk kinerja yang diberikan kepada masyarakat yang bergantung pada hutan, petani kecil, dan masyarakat adat.

Pada bulan September 2018, pada Global Climate Action Su mit di San Francisco, California (AS), seluruh anggota Satuan Tugas GCF mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Kolaborasi dan Kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat Adat, dan Masyarakat Setempat. Rangkaian 13 prinsip ini dikembangkan oleh organisasi-organisasi terkemuka di dunia dan disampaikan kepada Pemerintah untuk memandu kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah daerah, Masyarakat Adat dan masyarakat lokal dalam rangka memajukan tata kelola dan perlindungan hutan yang inklusif dan efektif.

Pada bulan Maret 2022, seluruh anggota Satuan Tugas GCF menyetujui kerangka kerja untuk mencapai tujuan iklim, pembangunan, dan perlindungan hutan jangka menengah hingga tahun 2030, yang disebut Rencana Aksi Manaus untuk Ekonomi Kehutanan Baru (MAP). Para anggota berkomitmen untuk mengurangi deforestasi hutan tropis setidaknya 80% pada tahun 2030, meningkatkan upaya reboisasi dan adaptasi, serta meningkatkan ketahanan hutan tropis, dengan pembiayaan dan dukungan jangka panjang yang memadai. Sebagaimana diuraikan dalam MAP, upaya kami untuk menciptakan ekonomi hutan baru: (1) Harus bekerja pertama dan terutama untuk masyarakat dan komunitas di negara bagian dan provinsi Satgas GCF; (2) Harus memobilisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengetahuan dan kearifan tradisional masyarakat yang tinggal di hutan; (3) Tidak dapat diciptakan tanpa dukungan keuangan tambahan yang substansial; dan (4) Tata kelola pemerintahan yang baik dan kebijakan publik yang tahan lama merupakan landasan strategi yurisdiksi dan rencana investasi.
Pada bulan Februari 2023, para anggota mengesahkan Kebijakan Gender Satuan Tugas GCF yang berjudul Perempuan untuk Hutan dan Iklim. Kebijakan ini berkomitmen untuk mendorong keterwakilan gender di semua tingkatan dan mengembangkan kegiatan, kebijakan, dan praktik tertentu untuk memajukan kesetaraan gender.

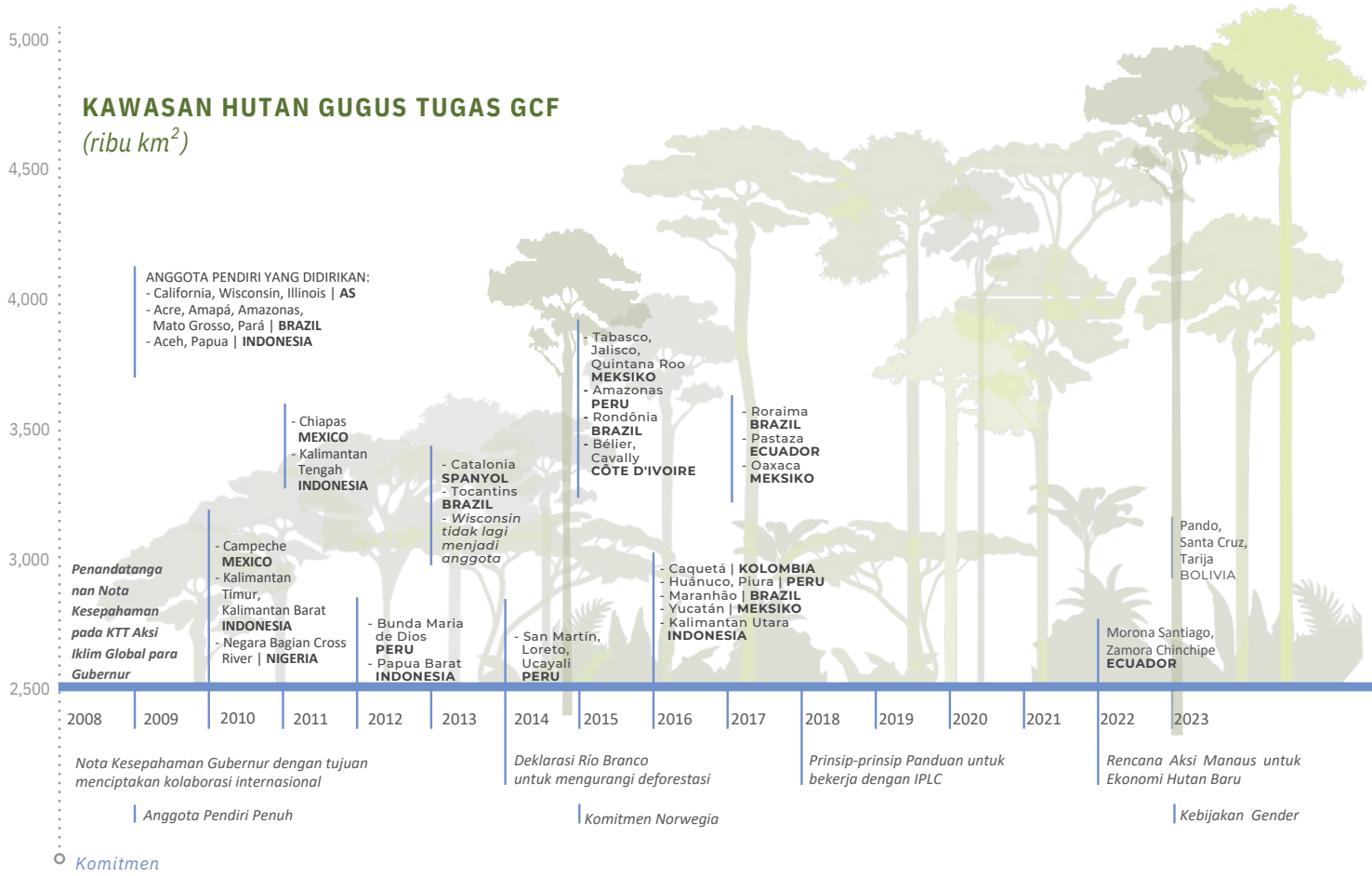

"Hanya ada sedikit sekali tempat di mana masyarakat adat dan pemerintah negara bagian dari seluruh dunia dapat berkumpul bersama dalam kemitraan sejati sebagai rekan pencipta inisiatif pembangunan ekonomi berkelanjutan. Satgas GCF adalah satu-satunya platform internasional yang telah menunjukkan komitmen aktif untuk memperbaiki dan meningkatkan keterlibatan antara pemerintah daerah dan masyarakat adat pemerintah dan pemimpin masyarakat adat."

JAVIER KINNEY

Manajer Proyek Karbon, Suku Yurok

Dukung Kami

Kami tidak dapat berpuas diri dengan keberhasilan kami hingga saat ini. Menyemai dan mendukung kepemimpinan pemerintah daerah, serta membangun kemitraan yang efektif untuk mewujudkannya, merupakan upaya yang berkelanjutan dan dinamis. Di halaman-halaman berikutnya, Anda akan membaca tentang realitas negara bagian, provinsi, dan wilayah kami. Anda akan mempelajari peluang dan tantangan subnasional berdasarkan negara, serta mengetahui bagaimana Anda dapat bekerja sama dengan yurisdiksi anggota GCF Task Force tertentu. Yang terpenting, dan seperti biasa, perspektif yang dibagikan di sini berasal langsung dari para anggota GCF Task Force. **Mereka paling memahami realitas dan peluang investasi, dan mitra sejati yang mempertimbangkan realitas ini adalah satu-satunya harapan kita untuk mengatasi krisis iklim bersama.**

Membangun Kesuksesan

Selama 15 tahun terakhir, kami telah berhasil membangun kesamaan praktik di seluruh pemerintahan dan administrasi, serta dengan masyarakat, yang telah meningkatkan suara dan keterhubungan yurisdiksi subnasional dan mitra di tingkat regional dan internasional. Kami telah mendorong peningkatan dramatis dalam kapasitas subnasional dan mandat tingkat negara bagian dan provinsi untuk melindungi hutan dan iklim dengan secara langsung mendukung upaya mereka dan memberikan bantuan:

BANTUAN TEKNIS & DUKUNGAN KOORDINASI

Untuk 43 yurisdiksi anggota

PENGEMBANGAN DAN KETERPADUAN KEBIJAKAN

- 35 strategi dekarbonisasi dan investasi di tingkat negara bagian
- Kerangka kerja umum Rencana Aksi Manaus untuk Ekonomi Hutan Baru

KEKUATAN PERTEMUAN

Dialog kebijakan, jaringan, keterlibatan sektor publik-swasta

MEMANFAATKAN PELUANG PENDANAAN

650 juta dolar AS lebih dalam bentuk hibah, pinjaman, pembayaran sejak tahun 2012 untuk aksi nyata di lapangan

PEMBELAJARAN TEMAN SEBAYA

Puluhan lokakarya, pertemuan teknis, dan pertukaran regional per tahun

KOMITMEN PERLINDUNGAN HUTAN

- Setidaknya 80% pengurangan deforestasi pada tahun 2030
- Pemulihan yang ditingkatkan
- Peningkatan upaya adaptasi

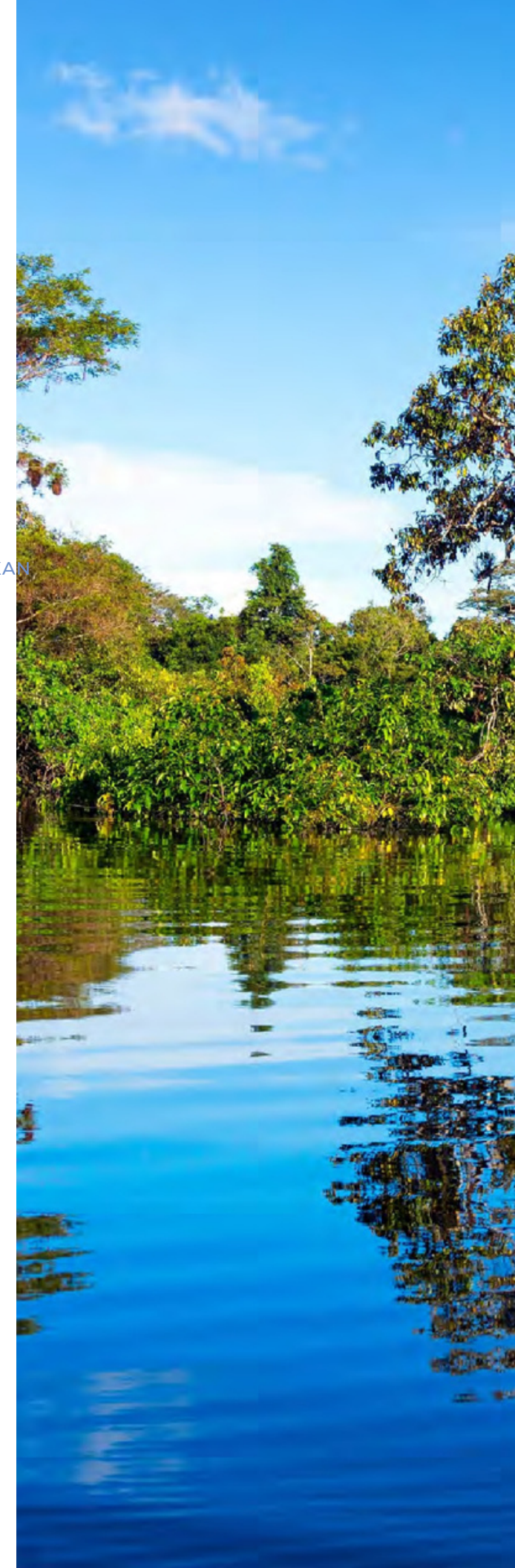

Profil Yurisdiksi

Bolivia

YURISDIKSI
Pando, Santa Cruz dan Tarija

Ancaman dan Tantangan terhadap Konservasi Hutan dan Peningkatan Mata Pencaharian serta Pengurangan Kemiskinan (atau Peningkatan Pembangunan Rendah Emisi)

- Deforestasi dan degradasi hutan, terutama karena perluasan lahan pertanian, peternakan, dan kedelai, terutama di Tarija.
- Kebakaran hutan di kawasan konservasi semakin meluas, baik dari segi luas, jumlah kejadian, maupun frekuensinya.
- Tekanan demografis dan pertumbuhan perkotaan. Meningkatnya pemukiman manusia di kawasan hutan dan kawasan lindung.
- ubsidi bahan bakar di tingkat nasional memungkinkan akses dan penggunaan alat berat untuk membersihkan hutan.
- Harga castana (kacang Brasil) yang rendah dan keterbatasan pasar untuk produk hutan lainnya membuat masyarakat di Pando tidak tertarik dan mengurangi nilai hutan yang masih ada sebagai alternatif ekonomi bagi penduduknya.

Peluang Pendanaan Utama/Dukungan yang Dibutuhkan oleh Negara-negara Anggota GCF di Bolivia:

- **Masyarakat dan Komunitas**
  - Pengembangan dan peningkatan rantai nilai yang mempromosikan hutan yang masih ada sebagai peluang untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Hal ini akan membutuhkan dana sebesar USD 5.000.000 selama satu dekade untuk menyelesaikan transisi di Pando atau Santa Cruz.
  - Menciptakan ruang yang diperlukan untuk partisipasi yang efektif bagi pemerintah daerah dan lokal serta masyarakat adat, terutama perempuan, dalam proses pengambilan keputusan terkait wilayah mereka. USD 2.000.000 selama 7 tahun.
  - Meningkatkan jaringan lokal untuk mempromosikan ketahanan pangan keluarga, kebun dan pertanian keluarga, dan lainnya. USD 1.000.000 selama 3 tahun.
- **Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi**
  - Pengembangan bioekonomi hutan sebagai mekanisme untuk menghargai rantai pasokan berbasis hutan.

USD 1.000.000 selama 7 tahun.

- Meningkatkan Sistem Informasi Upaya Perlindungan (SIS) dalam pemantauan deforestasi dan keanekaragaman hayati. USD 500.000 per tahun selama 10 tahun.
- Peningkatan sistem irigasi untuk penggunaan sumber daya air yang efisien. USD 2.000.000 selama 10 tahun.
- Pemanenan air hujan dan sistem penyimpanan efisien lainnya (mempromosikan sistem yang berbasis ekosistem). USD 5.000.000 selama 5 tahun.
- Menerapkan inovasi dalam produksi, terutama untuk peternakan (misalnya peternakan regeneratif, deforestasi terkendali, pertanian cerdas-iklim, dan lanskap produktif yang dilindungi). USD 2.000.000 selama satu dekade.

➤ **Keuangan, Investasi, dan Sektor Swasta**

- Kemitraan publik-swasta dengan produsen yang menghasilkan pembiayaan untuk pengurangan deforestasi. USD 1.000.000 selama lima tahun.
- Proses sertifikasi (penelusuran produk ramah lingkungan) dan mekanisme kompensasi. USD 1.000.000 selama 7 tahun.

➤ **Kebijakan Pemerintah dan Publik**

- Implementasi Kebijakan Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan: Dukungan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang mendorong konservasi ekosistem dan pembangunan berkelanjutan. USD 2.000.000 selama satu dekade.
- Dukungan bagi masyarakat adat untuk mencapai otonomi penuh. USD 5.000.000 selama satu dekade.
- Penguatan kelembagaan melalui pertukaran informasi mengenai praktik-praktik baik antara pemerintah daerah dan nasional. USD 1.000.000 selama 5 tahun.
- Penciptaan kawasan konservasi alam subnasional baru, untuk integrasi regional dan pelibatan pemerintah daerah. USD 4.000.000 selama 5 tahun.

Kemitraan Utama di Bolivia

Di tingkat internasional, Departemen Pando, Tarija dan Santa Cruz merupakan anggota dari Governors Climate and Forest Task Force dan bekerja sama dengan LSM internasional dan nasional lainnya seperti Fundación Natura Bolivia, WWF, WCS, Conservation International, dan Conservación Amazónica.

Pando adalah anggota Koridor Pariwisata Trinasional Amazon-Ande- an Peru, Brasil, dan Bolivia dan Platform Antar Lembaga untuk Artikulasi Kompleks Produksi Buah-buahan Amazonia - PICFA, dengan koordinasi pemerintah-swasta. Santa Cruz dan Tarija adalah anggota dari Integrasi Tengah Barat Amerika Selatan. tion Zone (ZICOSUR) dan Departemen Santa Cruz adalah anggota kampanye global Race To Zero untuk menggalang kepemimpinan dan dukungan dari bisnis, kota, wilayah, dan investor demi pemulihan yang sehat, tangguh, dan tanpa karbondioksida yang mencegah ancaman di masa depan, menciptakan lapangan kerja, dan membuka pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pando

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
63,827 [6]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
6,005,414 [7]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
154,400 [6]

POPULASI PEDESAAN / PERKOTAAN
40.5% / 59.5% [7]

ANGGOTA SEJAK
2023

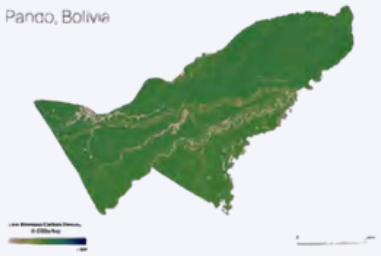

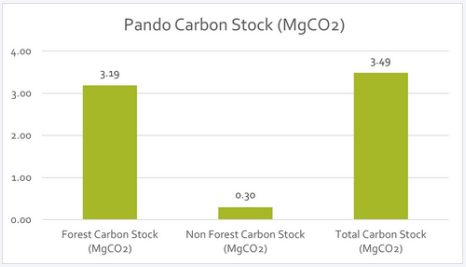

Peta per November 2023. Untuk informasi terbaru mengenai perubahan, emisi, dan penghapusan stok karbon di semua yurisdiksi, silakan kunjungi ctrees.org.

Santa Cruz

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
370,621 [6]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
26,540,604 [8]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
4,000,143 [9]

POPULASI PEDESAAN / PERKOTAAN
44%/ 56% [6]

ANGGOTA SEJAK
2023

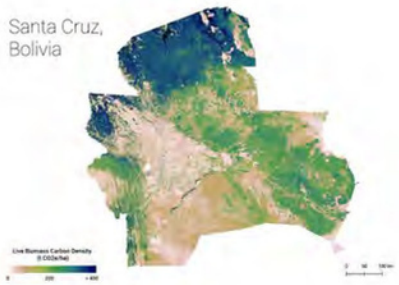

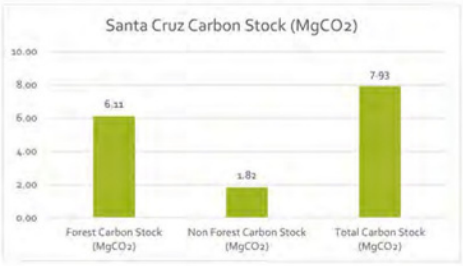

[6] Instituto Nacional de Estadística. https://www.ine.gob.bo

[7] Secretaría Departamento de Gestión Integral de la Madre Tierra; Cobertura Boscosa en GADP (2018). Cobija, Pando; GADP.

[8] Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - Dirección de Recursos Naturales; Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Cobertura Boscosa (2018). Santa Cruz de La Sierra, Santa Cruz; GADSC.

[9] Instituto Cruceño de Estadísticas; Informaciones Demograficas. Diambil dari https://www.santacruz.gob.bo

Tarija

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
37,623 [6]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
2,012,000 [10]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
601,214 [6]

POPULASI PEDESAAN / PERKOTAAN
32.2 %/ 67.8 % [6]

ANGGOTA SEJAK
2023

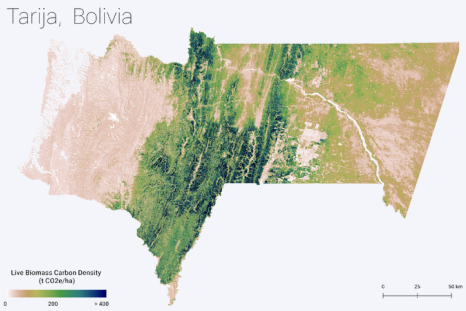

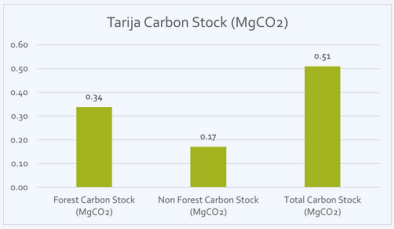

"Penting untuk menyoroti pentingnya membangun Komite Global Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di dalam Satuan Tugas GCF sebagai ruang untuk membangun kesepakatan antara perwakilan pemerintah daerah dan organisasi komunitas lokal dan masyarakat adat."

GUSTAVO SÁNCHEZ
Tim Eksekutif Komite Global (Direktur di Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques)

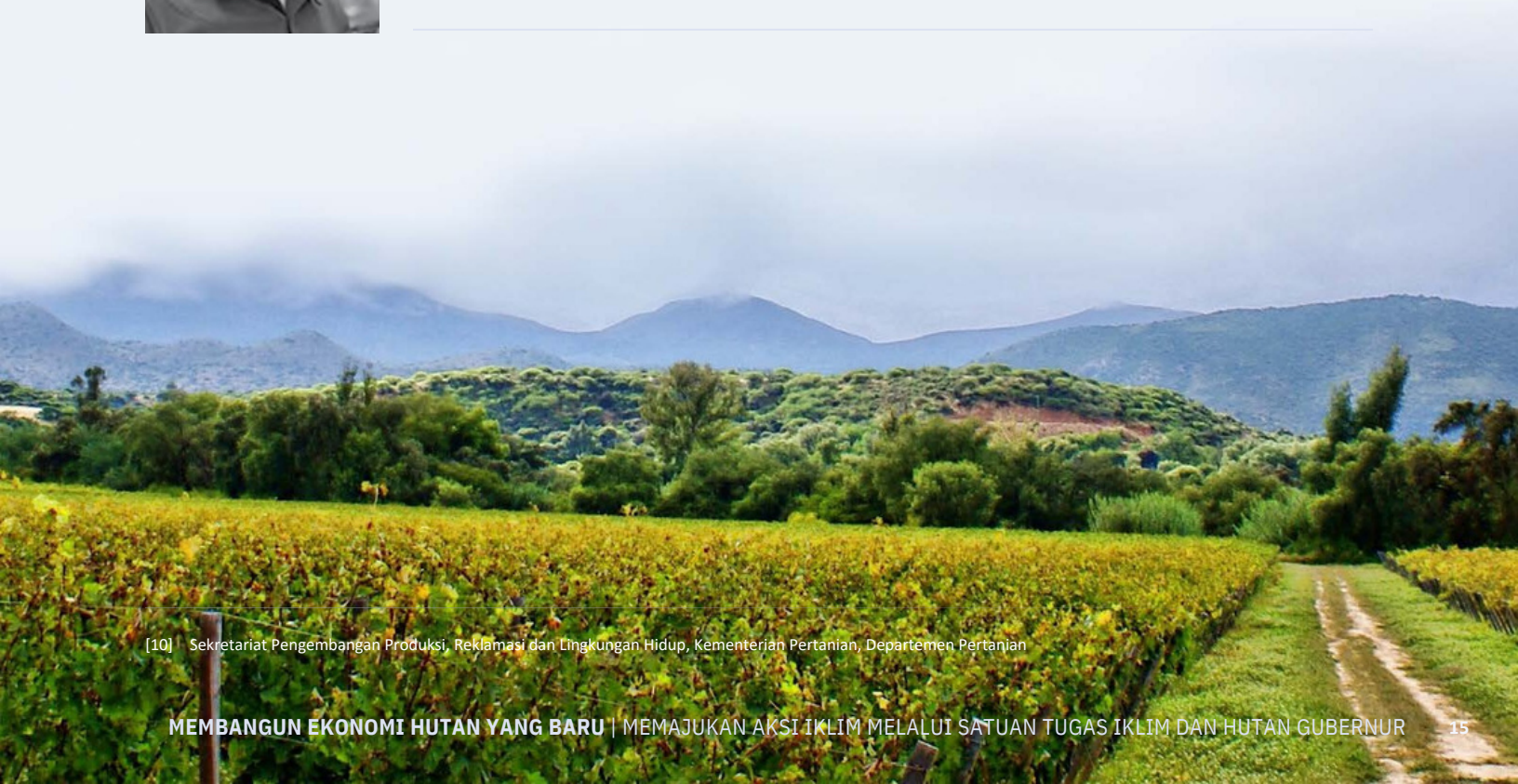

[10] Sekretariat Pengembangan Produksi, Reklamasi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Departemen Pertanian

Brasil

YURISDIKSI
Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima dan Tocantins

Ancaman dan tantangan utama untuk konservasi hutan dan promosi mata pencaharian yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan:

- **Kebijakan Pemerintah dan Publik**
  - Ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Brasil terkait dengan tindakan yang diperlukan untuk mengubah moda pembangunan ekonomi saat ini menjadi model inklusif yang memungkinkan untuk mengatasi tuntutan penciptaan lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat setempat, yang intensif dan efektif dalam menilai stok hutan yang masih ada dan memungkinkan serta mendorong pemanfaatan dan pemulihan kawasan terdegradasi dan restorasi hutan.
  - Tantangan utama berbeda-beda di setiap negara bagian, tergantung pada faktor-faktor seperti kerangka kerja peraturan, kapasitas kelembagaan, dan komposisi matriks produksi. Kebutuhan untuk mengadopsi atau meningkatkan strategi komando dan kontrol yang efektif untuk menghentikan kegiatan ilegal, dengan tindakan terkoordinasi untuk mempromosikan regularisasi lahan dengan kontrol perbatasan dan tindakan terhadap kejahatan terorganisir. Untuk memperkuat proses peralihan menuju ekonomi hutan yang baru - bioekonomi.
  - Meskipun, pada berbagai tingkat tata kelola lingkungan, peran negara telah terbukti penting untuk mencapai tujuan konservasi iklim dan keanekaragaman hayati, pendekatan lintas negara dan keterlibatan serta interaksi dengan Pemerintah Nasional dan pemerintah kota sangat penting, dalam kerangka Pakta Federasi. Pengadopsian pakta dan kerja sama antara berbagai aktor juga merupakan syarat lain, yang mengakui dan menghargai kontribusi kelembagaan organisasi masyarakat sipil, sektor akademik, dan sektor swasta, sehingga meminimalkan kemungkinan duplikasi upaya. Membangun dan memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangatlah penting. Inisiatif apa pun yang bertujuan untuk mengembangkan wilayah secara berkelanjutan tidak dapat mengabaikan fakta bahwa hampir 70% populasi di kawasan ini terkonsentrasi di daerah perkotaan dan bahwa pusat-pusat pengajaran dan pengetahuan yang memiliki potensi inovasi berada di sana.

"Semakin banyak kita melihat persepsi bahwa segala sesuatu terjadi di tingkat lokal, tentu saja, semua hal memiliki dimensi global, tetapi tanpa diragukan lagi, mekanisme yang memiliki daya tarik transformatif terbesar adalah mekanisme yang berakar lebih dalam pada perasaan penduduk."

SIMO JATENE

Mantan Gubernur, Pará, Brasil

Peluang Pendanaan Utama/Dukungan yang Dibutuhkan oleh Negara-negara Anggota GCF di Brasil:

➤ Kebijakan Pemerintah dan Publik

- Rencana negara bagian untuk memerangi deforestasi ilegal (US$150 juta per negara bagian selama lima tahun). Semua rencana negara bagian untuk memerangi deforestasi ilegal dan memerangi kebakaran hutan mempertimbangkan investasi dalam sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV), intelijen teritorial terpadu (mempertimbangkan prosedur operasional, ruang situasi, dan penyesuaian dasar hukum) dan memerangi kejahatan lingkungan (sumber daya manusia tambahan, peralatan, dan infrastruktur). Sumber daya ini dapat meningkatkan aksi regional di bawah koordinasi Konsorsium Antar Negara Bagian untuk Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan.

- Meningkatkan implementasi kebijakan publik yang terintegrasi (US$10 juta untuk setiap negara bagian selama lima tahun). Beberapa negara bagian memiliki program pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, yang melengkapi Rencana Negara Bagian untuk Menghentikan Deforestasi, seperti Program Amazonas Mais Verde di Amazonas, Rencana Negara Bagian Amazônia Agora di Pará, dan Strategi Memproduksi, Melestarikan, dan Menyertakan di Mato Grosso. Di negara bagian lain, desain dan implementasi dari inisiatif terpadu ini harus dilakukan.

- Persiapan, Validasi dan Implementasi Rencana Negara Bagian untuk Pemulihan Vegetasi Asli (US $ 90 juta selama lima tahun). Berdasarkan pengalaman Pará baru-baru ini dalam merumuskan Rencana Negara Bagian, yang masih dalam tahap konsultasi publik, Pará berupaya mendukung semua negara bagian dalam merancang, memvalidasi, dan mengimplementasikan rencana ini yang merupakan instrumen yang mengintegrasikan dan menyatukan berbagai intervensi dan strategi serta tindakan pemerintah untuk pemulihan vegetasi. Hal ini diperlukan untuk merumuskan dan mengimplementasikan instrumen tata kelola dan perencanaan, seperti kebijakan publik, insentif keuangan, insentif pasar, praktik pertanian yang baik dan langkah- langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan skala tindakan pemulihan, terutama menargetkan kawasan cagar alam dan kawasan pelestarian permanen serta kawasan yang terdegradasi. Rencana- rencana ini tidak dimaksudkan sebagai instrumen yang berdiri sendiri dan harus dilihat dan digunakan sebagai pelengkap dan cara yang diperlukan untuk mendorong Kebijakan Negara tentang Perubahan Iklim, Bioekonomi, atau Pembangunan Rendah Emisi.

➤ Keuangan, Investasi, dan Sektor Swasta

- **Akses terhadap pendanaan iklim REDD+ (U$5 juta per negara bagian selama lima tahun).** Pergerakan terbaru dalam penataan pasar karbon yurisdiksi sukarela yang terkait dengan peluncuran Koalisi LEAF, dan pengakuan standar untuk melaksanakan transaksi karbon yurisdiksi telah meningkatkan tindakan pemerintah daerah untuk memenuhi persyaratan Standar TREES. Investasi tambahan sangat diperlukan untuk melengkapi kualifikasi negara untuk mengakses pasar karbon yurisdiksi sukarela REDD+, dengan fokus pada aspek teknis dan politis serta aspekaspek lain yang belum ditangani dan terkait dengan MRV dan audit eksternal. Diperkirakan bahwa investasi yang telah dilakukan hingga saat ini mewakili 1/4 dari total investasi yang dibutuhkan, tanpa mempertimbangkan bahwa investasi tambahan harus disalurkan untuk secara efektif mengurangi deforestasi dan dengan demikian dapat melakukan transaksi CRE.

- **Sistem pembayaran untuk jasa lingkungan dan kredit keanekaragaman hayati yang memungkinkan (US$90 juta untuk wilayah tersebut selama lima tahun).** Sebuah mekanisme penting untuk menghargai jasa lingkungan. Meskipun terdapat instrumen pasar untuk membayar jasa lingkungan yang terkait dengan sumber daya air, instrumen yang terkait dengan pemeliharaan tegakan hutan tidak mencukupi dan terbatas pada program-program publik. Terkait dengan produk keanekaragaman hayati yang tunduk pada kebijakan pembayaran jasa lingkungan, kita memiliki kasus pirarucu di Amazonas dan karet di Acre.

- **Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi**

  Penciptaan kondisi yang memung kinkan untuk pengembangan bioekonomi (US$50 juta per negara bagian, selama lima tahun) untuk menciptakan atau melengkapi program subnasional terintegrasi yang sedang berlangsung, seperti Program Amazonas Mais Verde, Strategi Memproduksi, Melestarikan, dan Menyertakan, serta Rencana Negara Bagian Amazônia Agora dan komponen-komponennya. Tujuan umumnya adalah untuk berinvestasi dalam tindakan yang meningkatkan daya saing wilayah Amazon, mengurangi risiko peraturan dan risiko lain yang terkait dengan investasi, mendukung penataan tim teknis di negara-negara bagian yang mendukung implementasi kebijakan publik dan koordinasi dan implementasi antar sektor dan antar lembaga.

Masyarakat dan Komunitas

Komite IPLC Satgas GCF di Brasil telah mengidentifikasi area pendanaan prioritas dan proyek-proyek yang siap untuk diimplementasikan: pengembangan ekonomi adat dan mekanisme produksi; perencanaan organisasi dan peningkatan kapasitas; berbagi pengetahuan tentang strategi pengelolaan lingkungan dan wilayah; pengembangan kebijakan publik; dan- sebagai elemen lintas sektoral dalam setiap proyek ini- pengembangan mekanisme untuk meningkatkan kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda. Penerima manfaat langsung adalah masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh Amazon Brasil, dengan organisasi mereka dan Chico Mendes Memorial sebagai mitra pelaksana. Program ini membutuhkan dana sebesar US$ 35 juta selama 5 tahun.

Kemitraan

Satuan Tugas GCF di Brasil berkoordinasi erat dengan para mitra dari pemerintah, masyarakat sipil yang terorganisir, dan sektor swasta, termasuk Interstate Con- sortium for the Sustainable Development of the Legal Amazon dan Brazilian Association for State Enviromental Entities (Abema). Negara-negara bagian GCF juga membentuk Komite Regional Masyarakat Adat dan Komunitas Tradisional, yang terdiri dari 8 organisasi non-pemerintah dan lebih dari 10 organisasi masyarakat adat dan komunitas tradisional.

hubungan. Komite Regional telah memainkan peran penting dalam memungkinkan mobilisasi organisasi- organisasi masyarakat adat setempat, serta partisipasi para pemimpin negara. Komite Regional melakukan pekerjaannya melalui beberapa kelompok kerja teknis yang berfokus pada topik-topik seperti kualifikasi dan kuantifikasi degradasi hutan, kerangka kerja hukum subnasional dan nasional. Satuan Tugas GCF di Brasil juga telah mengembangkan saluran dialog permanen dengan Pemerintah Federal dan lembaga-lembaga kerja sama.

Satgas GCF di Brasil juga bermitra dengan mitra teknis termasuk Kedutaan Besar Norwegia di Brasilia, IPAM, Sekretaris Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Pará, Kedutaan Besar Inggris di Brasilia, The Nature Conser- vancy, Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Earth Innovation Institute - EII, Environmental Defense Fund (EDF), Conservation International, Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Sitawi Finanças do Bem. USAID Brazil, Institute de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM, Instituto Centro de Vida - ICV, dan BVRio Institute, dan lain-lain.

Kredit: Arthur Castro

"Jaringan kerja sama GCF Task Force sangat penting agar rencana pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan. Mulai dari memobilisasi pendanaan dan pelatihan hingga bantuan teknis dan operasional, dukungan Satgas GCF telah mempercepat penjabaran dan pelaksanaan kebijakan publik di negara-negara yang memiliki hutan tropis."

JULIE MESSIAS

Negara Bagian Acre, Brasil

Acre

WILAYAH NEGARA BAGIAN (KM2)
164,173 [11]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
14,018,732.47 [12]

TOTAL POPULASI (PENDUDUK)
830,026 [13]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
27.39% / 72.56%

ANGGOTA SEJAK
2008

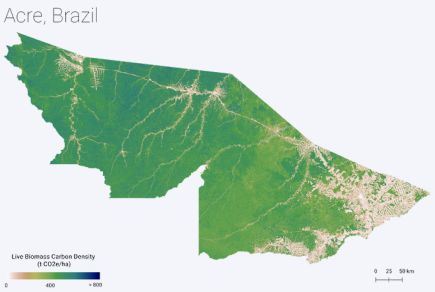

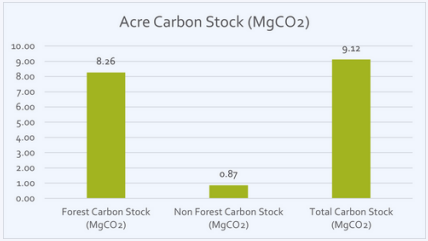

Amapá

S LUAS WILAYAH (KM2)
142,471 [11]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
11,639,880.7 [12]

TOTAL POPULASI (PENDUDUK)
733,508 [13]

PENDUDUK PEDESAAN/PERKOTAAN
10.23% / 89.77% [13]

ANGGOTA SEJAK
2008

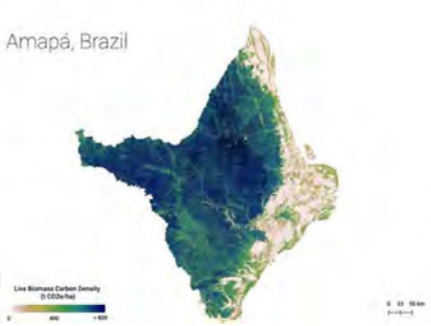

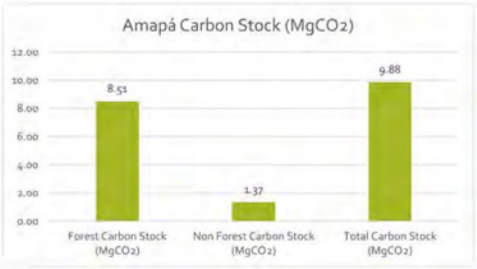

[11] Wilayah Teritorial: Wilayah teritorial Brasil 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2023

[12] CGTI, A. (n.d.). Mapa de Cobertura Vegetal. Cobertura Vegetal. https://antigo.mma.gov.br/biomas/amaz%C3%B4nia/mapa-de-cobertura-vegetal.html

[13] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (n.d.). PGI - plataforma geográfica interativa. https://censo2022.ibge.gov.br/apps/pgi/#/home

Amazonas

WILAYAH NEGARA BAGIAN (KM2)
1,559,256 [11]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
145,494,177.36 [12]

TOTAL POPULASI (PENDUDUK)
1,559,256 [13]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
20.91% / 79.09% [13]

ANGGOTA SEJAK
2008

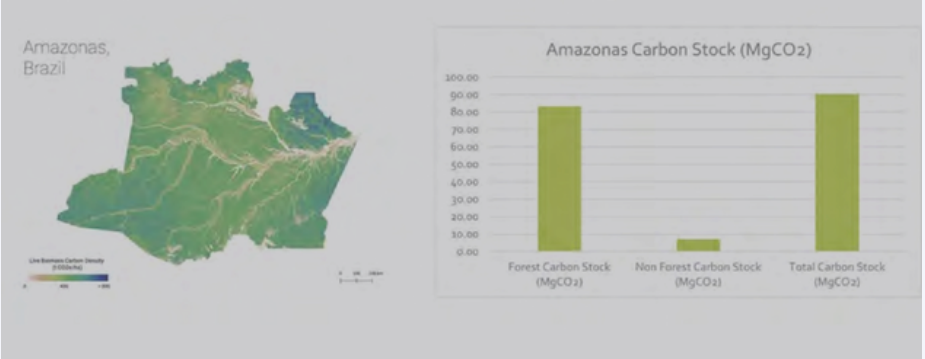

Maranhão

S LUAS WILAYAH (KM2)
329,651 [11]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
18,453,862.98 [12]

TOTAL POPULASI (PENDUDUK)
830,026 [13]

POPULASI PEDESAAN / PERKOTAAN
27.39% / 72.56% [13]

ANGGOTA SEJAK
2016

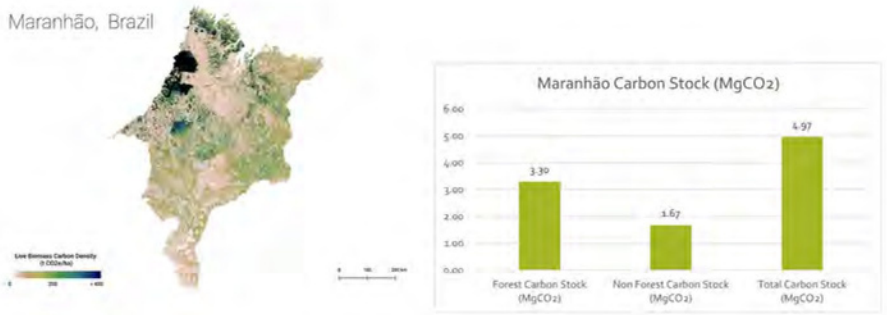

"Pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam dialog rencana pembangunan rendah emisi tidak dapat diremehkan. Satuan Tugas GCF merupakan kunci untuk membentuk komite regional IPLC di Brasil, mengikuti Prinsip-Prinsip Panduan IPLC, untuk bekerja dalam kemitraan dengan masyarakat adat. Jaringan GCF Task Force perlu terus diperluas, karena beberapa negara dan pemerintah daerah tidak melakukan pekerjaan rumah mereka dalam hal mengikutsertakan para penjaga hutan yang sebenarnya dalam rencana mereka."

FRANCISCA ARARA
Sekretaris Masyarakat Adat, Negara Bagian Acre, Brasil

Mato Grosso

WILAYAH NEGARA BAGIAN (KM2)
903,208 [11]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
47,626,157.84 [12]

TOTAL POPULASI (PENDUDUK)
3,658,813 [13]

PENDUDUK PEDESAAN/PERKOTAAN
18.20% / 81.80% [13]

ANGGOTA SEJAK
2008

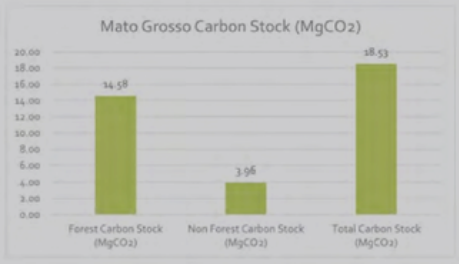

Pará

S LUAS WILAYAH (KM2)
1,245,871 [11]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
93,141,315.96 [12]

TOTAL POPULASI (PENDUDUK)
8,116,132 [13]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
31.52% / 68.48% [13]

ANGGOTA SEJAK
2008

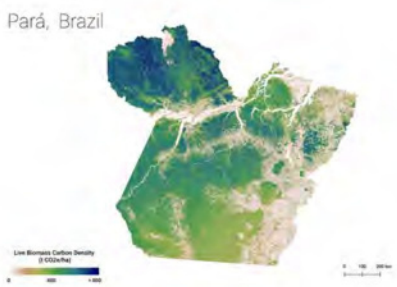

Rondônia

WILAYAH NEGARA BAGIAN (KM2)
237,754 [11]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
13,302,336.3 [12]

JUMLAH PENDUDUK
1.581.016 [13]

PENDUDUK PEDESAAN/PERKOTAAN
26.48% / 73.55% [13]

ANGGOTA SEJAK
2014

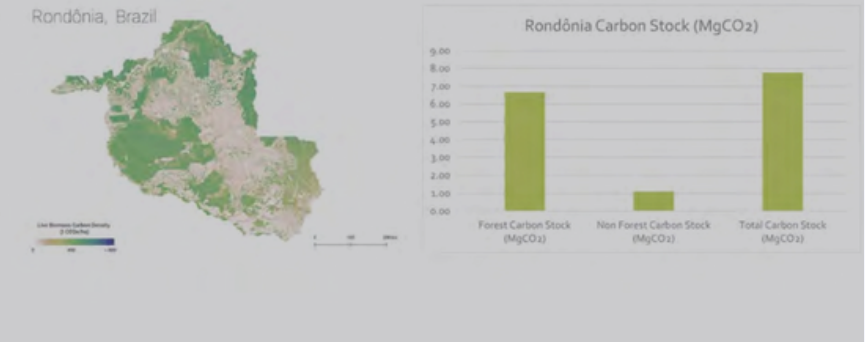

Roraima

WILAYAH NEGARA BAGIAN (KM2)
233,645 [11]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
17,086,458.85 [12]

TOTAL POPULASI (PENDUDUK)
636.303 [13]

PENDUDUK PEDESAAN/PERKOTAAN
23.45% / 76.55% 13

ANGGOTA SEJAK
2016

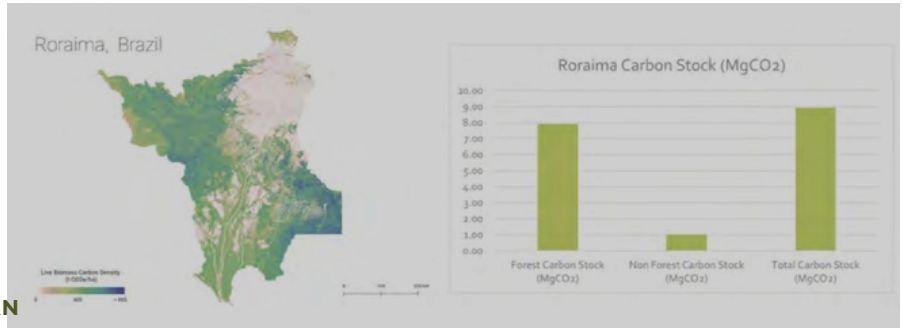

"Negara-negara ini bekerja sama untuk menciptakan kerangka kerja yang akan memungkinkan pengurangan emisi dari deforestasi untuk dimasukkan ke dalam rezim kebijakan Amerika Serikat dan internasional yang sedang berkembang. Sungguh luar biasa melihat apa yang telah dicapai oleh inisiatif ini selama beberapa tahun terakhir dan masih banyak lagi yang akan datang."

HARRISON FORD

Bagian dari pidato yang disampaikan oleh Harrison Ford pada Governors' Global Climate Summit 3 pada bulan November 2010.

Tocantins

WILAYAH NEGARA BAGIAN (KM2)
277,424 [11]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
13,077,505.14 [12]

TOTAL POPULASI (PENDUDUK)
1,511,459 [13]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
21.20% / 78.80% [13]

ANGGOTA SEJAK
2012

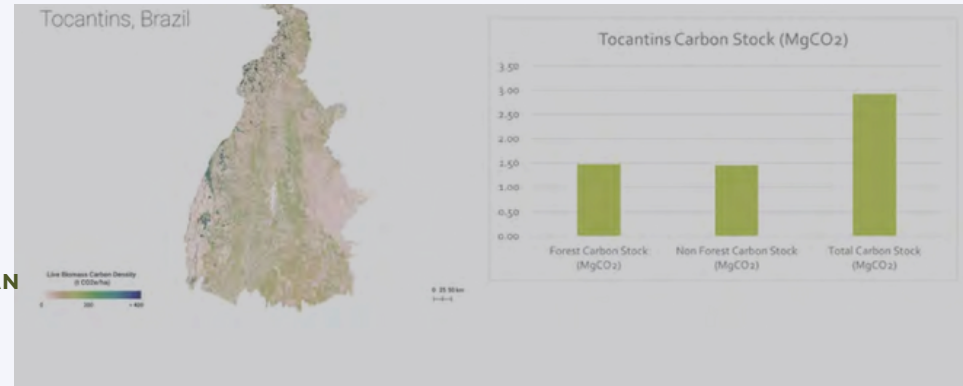

Kredit: Fernando Alves

Kolombia

YURISDIKSI
Caquetá

Kredit: Jhon Barros

Caquetá

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
92,709 [14]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
6,074,409.18 [15]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
425,053 [16]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
34.36% / 65.64% [17]

ANGGOTA SEJAK
2016

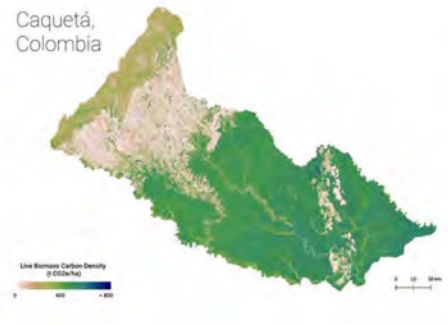

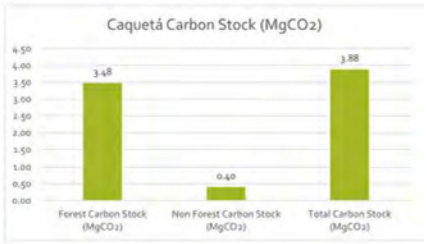

[14] Consulta Catastral | GEOPORTAL. (n.d.). Geoportal.igac.gov.co. https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral

[15] Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana - SIAT-AC. https://siatac.co/

[16] Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Proyeksi populasi (2018). https://www.dane.gov.co/index.php/estadisti- cas-por-tema/demografia-y-populasi/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion

[17] Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Proyeksi populasi (2018). https://www.dane.gov.co/index.php/estadisti- cas-por-tema/demografia-y-populasi/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion

Ancaman dan Tantangan terhadap Konservasi Hutan dan Peningkatan Mata Pencaharian serta Pengurangan Kemiskinan (atau mempromosikan Pembangunan Rendah Emisi)

- Ancaman: konflik bersenjata. Jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan damai di Kolombia, maka akan sangat sulit untuk melaksanakan kontrol teritorial, dan tata kelola lokal dan kelembagaan untuk memimpin proses implementasi mata pencaharian berkelanjutan dan model pembangunan rendah emisi, mengingat ketidaknyamanan dalam tata kelola teritorial.
- Tantangan untuk mengembangkan ekonomi hutan. Di wilayah de- partement Caquetá, kami berupaya untuk menghasilkan ekonomi hutan dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan berdasarkan produk kayu dan non- kayu, sebagai bagian dari menghasilkan budaya hutan yang seharusnya menjadi alternatif bagi penduduk lokal dan masyarakat serta masyarakat adat yang mendiami hutan di wilayah tersebut.
- Menghasilkan rantai pasokan untuk produk hutan merupakan tantangan besar dalam membangun aliansi pemerintah-swasta, mengingat perusahaan swasta mencari daerah yang memiliki kondisi hukum dan keamanan yang layak untuk investasi. Meskipun demikian, kami membuat kemajuan dalam menciptakan kondisi pasar dengan dukungan kerja sama internasional.

Peluang / Dukungan Pendanaan Utama yang Dibutuhkan oleh Negara-negara Anggota GCF di Kolombia

- **Masyarakat dan Komunitas**
  - Memajukan proses hak-hak teritorial
  - Pelatihan teknik pemanenan hasil hutan (pengelolaan hutan lestari)
- **Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi**
  - Penelitian dan pengembangan terkait rantai bioekonomi
  - Inovasi untuk memasukkan hasil hutan non-kayu ke dalam rantai pasok
- **Keuangan, Investasi, dan Sektor Swasta**
  - Aliansi publik-swasta untuk menjamin pasar bagi produk kehutanan yang berkelanjutan
  - Pembiayaan bank pemerintah dan swasta untuk bisnis bioekonomi
- **Kebijakan Pemerintah dan Publik**
  - Menciptakan kondisi hukum yang menjamin investasi publik dan swasta
  - Menerapkan kebijakan publik rendah emisi yang telah dikembangkan dalam satu dekade terakhir

Proyek yang mudah didanai di Caquetá

- Restorasi hutan yang produktif dan fungsional untuk menghasilkan proses konektivitas ekosistem dan ekonomi lokal. USD 5.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun
- Perencanaan agro-lingkungan di departemen Caquetá. USD 900.000 untuk jangka waktu 18 bulan untuk memandu investasi dan ekonomi rendah emisi.
- Rencana pengelolaan hutan untuk departemen Caquetá dan perizinan seluas 50.000 hektar untuk penggunaan kehutanan oleh pemilik kecil (campesino). USD 4.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun, untuk membangun dan mengembangkan rantai nilai produk kayu dan non-kayu melalui proses bioekonomi

Kemitraan Utama

Departemen Caquetá memiliki aliansi di berbagai tingkatan. Pada tingkat serikat pekerja produktif terdapat petani ternak, petani karet, petani kakao, petani kopi dan petani ikan. Dengan organisasi non- pemerintah, seperti The Nature Conservancy, Earth Innovation Institute dan Fundación para Conservación y Desarollo de (FCDS), yang telah bekerja pada restorasi produktif di tingkat proyek dan lanskap, pengelolaan hutan lestari, serta konsolidasi rantai nilai produk pertanian dan kehutanan. Selain itu, terdapat pula pekerjaan penting yang sedang dikembangkan dengan masyarakat adat dan petani untuk berkolaborasi dalam proses-proses produktif. Ada juga kemitraan dengan organisasi berbasis penelitian dan lembaga pemikir, seperti SINCHI - Institut Penelitian Ilmiah Amazon.

Kredit: Jhon Barros

Côte d’Ivoire

YURISDIKSI
Bélier & Cavally

Bélier

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
6,809

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
36,099.1 (2015) [18]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
415,593 (2021) [19]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
63.5% / 36.5% (2021) [19]

ANGGOTA SEJAK
2015

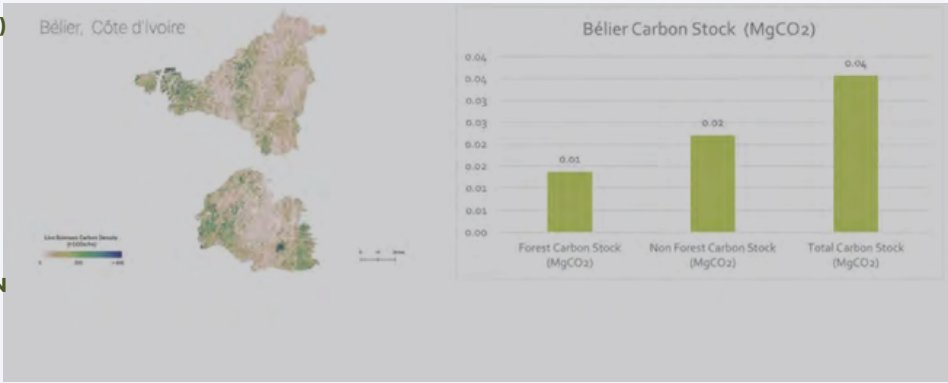

Cavally

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
11,280

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
52,000 (2019) [20]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
708,241 (2021) [19]

POPULASI PEDESAAN / PERKOTAAN
58.4% / 41.6% (2021) [19]

ANGGOTA SEJAK
2015

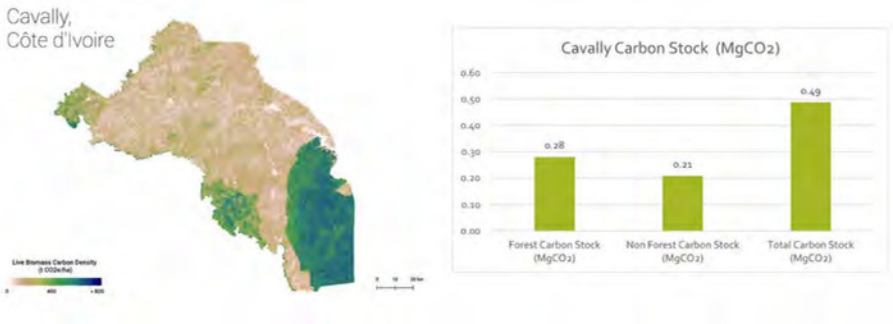

[18] Projet GCFTF. REDD+ Pantai Gading. Plan Stratégique Régional de Restauration des Paysages Forestiers dans la Région du Bélier (n.d.). https://reddplus.ci/projet-gcftf/

[19] Kementerian Perencanaan dan Pembangunan, Resultats Globaux Definitis (2022). Abidjan.

[20] Laporan yang disiapkan untuk badan antariksa Inggris pada bulan Juli 2020. (n.d.). https://www.spacefordevelopment.org/wp-content/uploads/2020/07/State- and-Trends-of-Deforestation-in-CdI.pdf

Ancaman dan Tantangan terhadap Konservasi Hutan dan Peningkatan Mata Pencaharian serta Pengurangan Kemiskinan (atau mendorong Pembangunan Rendah Emisi)

Pantai Gading telah lama menjadi produsen kakao (coklat) terbesar di dunia. Namun, produksi pertanian yang ekstensif telah mendorong deforestasi yang signifikan sejak kemerdekaan negara ini dari Perancis pada tahun 1960. Antara tahun 1990 dan 2020, diperkirakan negara ini telah kehilangan 63% tutupan hutannya. Pendorong utama deforestasi dan degradasi ini adalah produksi pertanian yang intensif, serta pembalakan liar dan produksi arang yang terkait dengan pembukaan lahan untuk pertanian. Seperti halnya di daerah tropis lainnya, ketika lanskap hutan mengalami deforestasi atau degradasi, lanskap tersebut kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan pasokan hasil hutan dan jasa ekologi yang cukup untuk kesejahteraan manusia, fungsi ekosistem, dan konservasi keanekaragaman hayati. Hal ini mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati, dampak negatif terhadap kualitas air, dan degradasi kesuburan tanah, serta dampak iklim yang diakibatkan oleh pelepasan emisi gas rumah kaca.

Ancaman dan tantangan utama terhadap konservasi hutan dan pembangunan rendah emisi di Pantai Gading adalah:

- Produksi pertanian yang ekstensif untuk tanaman seperti cao, kopi, kelapa sawit, kacang mete, dan karet telah menghasilkan hilangnya lahan hutan secara signifikan melalui pembukaan lahan. Meskipun tanaman-tanaman ini - khususnya kakao - telah menjadi pendorong ekonomi yang penting bagi perekonomian, hilangnya lahan hutan secara terus menerus dan meningkatnya lahan yang terdegradasi juga mengakibatkan berkurangnya produktivitas pertanian (dan keuntungan ekonomi) dari waktu ke waktu.[21]
- Penebangan liar yang didorong oleh perluasan pertanian, atau yang semakin meningkat, sebagai sumber pendapatan yang lebih penting bagi petani untuk dijual sebagai kayu atau arang. [22]
- Kurangnya pilihan dan keamanan ekonomi bagi penduduk yang terus bertambah, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan secara lebih baik.[23]

Peluang / Dukungan Pendanaan Utama yang Dibutuhkan oleh Negara-negara Anggota Gugus Tugas GCF di Pantai Gading:

Wilayah Bélier dan Cavally menghadapi kondisi dan pendorong deforestasi yang sama dengan negara secara keseluruhan. Peluang-peluang utama untuk mendukung peningkatan tata kelola hutan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Bélier dan Cavally telah diidentifikasi melalui proses pemangku kepentingan yang dilakukan dengan dukungan UNDP dan Satuan Tugas GCF sebagai bagian dari Rencana Strategis untuk Memulihkan Bentang Alam Hutan di Bélier dan Rencana Strategis untuk Produksi Pertanian Nol Deforestasi di Cavally. Jumlah pendanaan spesifik akan disertakan saat tersedia. Peluang-peluang ini meliputi:

---

[21] Portal data terbuka resmi (data.gouv.ci)

[22] Perkebunan kakao yang rindang merupakan akar dari deforestasi di Pantai Gading - ISS Africa

[23] Plan Stratégique Régional de Restauration des Paysages Forestiers dans la Région du Bélier, Plan Stratégique de Production Agricole Zéro-Déforestation de la Région du Cavally

➤ Masyarakat dan Komunitas

- Pengembangan kapasitas bagi petani dan masyarakat dalam metode produksi pertanian yang lebih berkelanjutan (pertanian tanpa deforestasi dan inisiatif wanatani) dan pengelolaan hutan kemasyarakatan.Mendukung
- terciptanya kegiatan ekonomi berbasis hutan yang lebih berkelanjutan, seperti melalui reboisasi, hasil hutan non-kayu, inisiatif wanatani, ekowisata, pembayaran jasa lingkungan, dan pendanaan karbon.

➤ Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi

- Mendukung pembentukan bank benih terpusat, serta pembibitan swasta dan berbasis masyarakat, yang ditujukan untuk upaya reboisasi dan restorasi lanskap.
- Mendukung peningkatan ketertelusuran hasil hutan (khususnya kakao) dan pengelolaan hutan melalui alat penginderaan jarak jauh, sistem sertifikasi, dan basis data pelacakan.

➤ Keuangan, Investasi, dan Sektor Swasta

- Mendukung pengembangan aliran pendapatan baru seperti pembayaran regional untuk program jasa ekosistem, pasar karbon, dan ekowisata yang terkait dengan upaya restorasi lanskap.
- Mengembangkan dan memperkuat rantai nilai dan akses ke pasar untuk hasil hutan yang dipanen secara berkelanjutan. Hal ini akan mencakup peningkatan akses terhadap kredit bagi para petani yang melakukan praktik-praktik yang lebih berkelanjutan.

➤ Pemerintah dan Kebijakan Publik

- Memperkuat proses dialog multi-pemangku kepentingan terkait tata kelola hutan dan tata guna lahan.
- Mendukung pembentukan hutan kemasyarakatan untuk menghutankan kembali lahan-lahan yang terdegradasi. Inisiatif ini akan mencakup dukungan untuk pengelolaan bibit dan pembibitan, upaya reboisasi, dan pengembangan proses tata kelola hutan bersama dengan badan-badan pemerintah.

Kemitraan Utama

Di Pantai Gading, setiap wilayah bekerja sama dengan Kementerian Air dan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, REDD+ Pantai Gading, Société de Développement des Forêts (SODEFOR), serta mitra-mitra utama seperti United Nations Development Program dan United Nations Environment Program, Bank Pembangunan Afrika, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional dan Wanatani Dunia (CIFOR-ICRAF), IDH, Yayasan Cacing Tanah, Yayasan Simpanse Liar, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, perusahaan swasta seperti Nestlé, dan asosiasi desa/komunitas.

Kredit: Metzger - Yayasan Simpanse Liar

Ekuador

YURISDIKSI
Morona Santiago, Pastaza, Zamora Chinchipe

Morona Santiago

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
24,052.2 [24]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
1`716.049,33 [25]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
147.940 [24]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
93% / 7% 24

ANGGOTA SEJAK
2023

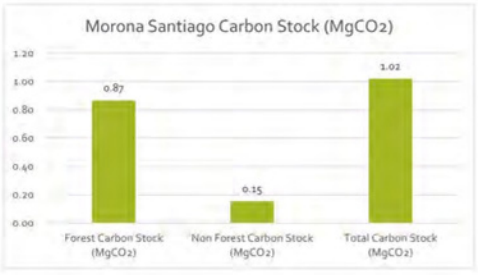

Ancaman dan Tantangan terhadap Konservasi Hutan dan Peningkatan Mata Pencaharian serta Pengurangan Kemiskinan (atau mempromosikan Pembangunan Rendah Emisi)

- Pertambangan, perluasan perbatasan pertanian, penebangan liar, perdagangan spesies, kurangnya dukungan pemerintah untuk proyek-proyek mata pencaharian masyarakat,
- Provinsi ini juga mengalami kehilangan budaya dan tradisi akibat eksodus penduduk dari pedesaan,
- Kurangnya data dasar keanekaragaman hayati dan isu-isu produktif,
- Provinsi ini perlu membangun rencana pembangunan jalan,
- Morona Santiago adalah provinsi dengan tingkat tertinggi dalam hal malnutrisi.

Peluang / Dukungan Pendanaan Utama yang Dibutuhkan oleh Negara-negara Anggota Gugus Tugas GCF di Ekuador

- **Masyarakat dan Komunitas - USD 2.923.280,80 selama 5 tahun**
  - Dukungan teknis untuk desain proyek, termasuk proses partisipatif yang diperlukan berdasarkan kebutuhan spesifik wilayah tersebut.
  - Artikulasi kesepakatan antara pemerintah provinsi dan organisasi masyarakat adat untuk konservasi wilayah dan implementasi mata pencaharian berkelanjutan
- **Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi - USD 18.027.484,00 selama 10 tahun**
  - Mengembangkan kesepakatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti proyek-proyek WASH dan konektivitas energi.
  - Proyek-proyek produksi inovatif untuk bioekonomi guna meningkatkan nilai tambah hasil hutan non-kayu.
  - Pengelolaan bersama wilayah hutan adat
  - Implementasi rantai nilai keanekaragaman hayati sosial
- **Keuangan, Investasi, dan Sektor Swasta - USD 13.827.760,00 selama 10 tahun**
  - Penciptaan ruang untuk bekerja secara terkoordinasi dengan para pemangku kepentingan konservasi.
  - Konstitusi dan operasionalisasi Dana Ama- zonian, yang diintegrasikan oleh pemerintah daerah yang membentuk Platform Amazon dan Masyarakat Adat untuk mendanai konservasi kawasan konservasi provinsi dan kebutuhan pembangunan yang merupakan bagian dari rencana implementasi REDD+.
- **Government and Public Policies — USD 1,730,880.00 over a period of 5 years**
  - Perumusan dan implementasi rencana REDD+
  - Pembentukan Model Pengelolaan Kehidupan dan Pemanfaatan Leluhur untuk Cagar Alam provinsi, Tarími-di Pujutaí Nunka
  - Penguatan organisasi sosial masyarakat adat di provinsi

Kemitraan Utama

Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), Pueblo Shuar Arutam (PSHA), Nación Shuar del Ecuador (NASHE), Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), Mesa Provincial de la Pitahaya, AFC (Agricultora Familiar Campesina) provinsi Mesa, Cooperación de cafetaleros de Morona Santiago, dan Mesa provincial ganadería sostenible.

[24] Gobierno Autónomo Descentralizado de Morona Santiago, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Morona Santiago 2019 -2023. https://moronasantiago.gob.ec/pdot-2019-2023/

[25] Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica del Ecuador- Mapa de cobertura y uso de la tierra del Ecuador Continental 2020. http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/

Pastaza

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
29,641 [26]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
2,781,255.39 [27]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
114,202 [26]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
56.01% / 43.00% [28]

ANGGOTA SEJAK
2017

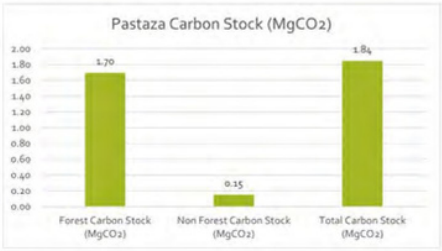

Ancaman dan Tantangan terhadap Konservasi Hutan dan Peningkatan Mata Pencaharian serta Pengurangan Kemiskinan (atau mendorong Pembangunan Rendah Emisi)

- Pertanian dan peternakan (Deforestasi)
- Tingginya persentase kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi

Peluang / Dukungan Pendanaan Utama yang Dibutuhkan oleh Negara-negara Anggota Gugus Tugas GCF di Ekuador

- **Masyarakat dan Komunitas - USD 3.654.101 selama 5 tahun.**
  - Pengembangan alternatif produksi yang berkelanjutan dan bebas deforestasi.
  - Mendorong perjanjian konservasi untuk melindungi sumber daya hutan dan air.
  - Mendorong pemulihan kawasan terdegradasi dan sumber air
- **Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi - USD 5.585.000 selama 5 tahun**
  - Menghasilkan informasi dan mendorong penggunaan keanekaragaman hayati untuk tujuan komersial.
- **Keuangan, Investasi, dan Sektor Swasta - USD 22.534.355 selama 5 tahun.**
  - Konstitusi dan operasionalisasi Dana Ama- zonian, yang diintegrasikan oleh pemerintah daerah yang membentuk Platform Amazon dan Masyarakat Adat untuk mendanai konservasi kawasan konservasi provinsi dan kebutuhan pembangunan yang merupakan bagian dari rencana implementasi REDD+
- **Pemerintah dan Kebijakan Publik - USD 2.163.600 selama 5 tahun.**
  - Memperkuat model tata kelola yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan masyarakat adat dan nasional untuk pengelolaan cagar alam provinsi

Kemitraan Utama

Pemerintah Kota dan Parokial yang terdesentralisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kerja sama bilateral - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Organisasi Masyarakat Adat dan Kebangsaan, Kementerian Lingkungan Hidup, Air, dan Transisi Ekologi (MAATE), Kementerian Pertanian dan Peternakan, serta asosiasi petani kecil (mestizo dan komunitas).

[26] Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza, Plan de Implementación de Medidas y Acciones REDD+ de la Provincia de Pastaza 2021. https://observatoriobcc.org/wp-content/uploads/2022/08/plan_implementacion_medidas.pdf

[27] Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica del Ecuador- Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra del Ecuador Continental 2020. http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/

Zamora Chinchipe

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
10,572.03 [28]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
668,560.7 [29]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
91,376 [28]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
56%/44% [28]

ANGGOTA SEJAK
2022

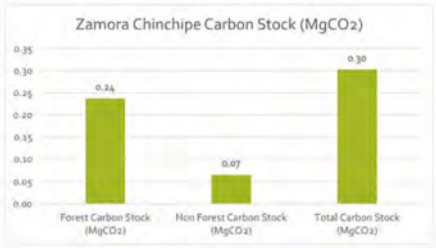

Ancaman dan Tantangan terhadap Konservasi Hutan dan Peningkatan Mata Pencaharian serta Pengurangan Kemiskinan (atau mempromosikan Pembangunan Rendah Emisi)

- Kegiatan penambangan ilegal di bantaran sungai
- Kegiatan penambangan ilegal di dalam kawasan lindung sebagai akibat dari lemahnya pengawasan dari Pemerintah
- Pembangunan jalan baru di kawasan hutan yang mendorong munculnya pemukiman baru
- Hilangnya nilai-nilai dan identitas budaya
- Perluasan perbatasan pertanian dan budidaya ikan serta produksi dan produktivitas yang tidak mencukupi
- Deforestasi karena kegiatan pertanian (kopi dan padang rumput) dan peternakan
- Tingginya persentase kemiskinan pendapatan karena ekonomi subsisten.
- Tingginya persentase kemiskinan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.

Peluang / Dukungan Pendanaan Utama yang Dibutuhkan oleh Negara-negara Anggota Gugus Tugas GCF di Ekuador

- **Masyarakat dan Komunitas - USD 1.278.935,35 selama periode 3 tahun**
  - Perjanjian konservasi secara langsung dengan masyarakat
  - Insentif kepada masyarakat untuk konservasi dan restorasi
  - Pengembangan kapasitas
- **Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi - USD 3.500.000 selama 3 tahun**
  - Rantai nilai hasil hutan bukan kayu
  - Teknologisasi sektor agro-produktif
- **Keuangan, Investasi, dan Sektor Swasta - USD 1.954.750,00**
  - Konstitusi dan operasionalisasi Amazo- nian Fund, yang diintegrasikan oleh pemerintah subnasional yang membentuk Amazonian Platform dan Indigenous Nationalities untuk mendanai konservasi kawasan konservasi pro- vinsi dan kebutuhan pembangunan yang merupakan bagian dari rencana implementasi REDD+
  - Pinjaman bank berbunga rendah
  - Terhubung dengan industri dan bisnis
- **Kebijakan Pemerintah dan Publik - USD 757,260.00 selama 3 tahun**
  - Lebih banyak artikulasi rencana dan kebijakan publik provinsi (Ordenanzas, PdIREDD+, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Mesas antar sektoral, Planes de vida de las Nacionalidades Indígenas)

Kemitraan Utama

Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe (FEPNASH - ZCH), Federación del Pueblo Kichwua Saraguro (Zamaskijat), Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur (FAPE - CAFES), Asociacion de Produccion Agropecuaria "LA CHACRA", Asociacion de Produccion de Cacao y Derivados Aromas del Sur ASOPROMAS, Asociación de productores orgánicos del río Mayo ACRIM, Asocia- ción de pequeños exportadores agropecuarios orgáni- cos de la Amazonía Ecuatoriana APEOSAE, Asociación Agroartesanal de Productores Ecológicos de Palanda y Chinchipe APECAP, Mesa de Ganadería de Zamora Chinchipe

[28] Pemerintah Pusat Desentralisasi Zamora Chinchipe, Rencana Pembangunan dan Pengaturan Wilayah Zamora Chinchipe 2019-2023. https://zamora-chinchipe.gob.ec/wp-content/uploads/2020/08/PDOT-2019-2023-ZAMORA-CHINCHIPE.pdf
[29] Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica del Ecuador- Mapa de cobertura y uso de la tierra del Ecuador Continental 2020. http://ide.ambiente.gob.ec:8080/mapainteractivo/

Indonesia

YURISDIKSI
Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat

Ancaman dan Tantangan terhadap Konservasi Hutan dan Peningkatan Mata Pencaharian serta Pengurangan Kemiskinan (atau mendorong Pembangunan Rendah Emisi)

Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam konservasi hutan dan meningkatkan mata pencaharian sekaligus mengurangi risiko atau mendorong pembangunan rendah emisi. Dari tahun 2014 hingga 2021, Indonesia mengalami deforestasi bruto lebih dari 3,9 juta hektar.30 Deforestasi juga berdampak pada daerah sekitarnya, seperti meningkatnya risiko kebakaran, banjir, erosi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Untungnya, laju deforestasi di Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan untuk melindungi hutan dan mendorong penggunaan lahan yang berkelanjutan, seperti pengetatan izin penebangan hutan dan perkebunan kelapa sawit di hutan primer dan lahan gambut. Indonesia juga telah menetapkan tujuan untuk menjadikan lahan hutannya sebagai penyerap karbon bersih pada tahun 2030.

Namun, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan kelanjutan tren penurunan serta memastikan keseimbangan dengan upaya pembangunan dan peningkatan mata pencaharian masyarakat. Beberapa tantangan yang teridentifikasi dalam mencapai tujuan-tujuan ini, terutama di provinsi-provinsi anggota GCF Task Force, adalah:

- **Kebijakan pengelolaan hutan dan lahan yang tidak terintegrasi antar tingkat pemerintahan**

  Hal ini merupakan salah satu isu utama dalam tata kelola hutan di Indonesia. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak selalu sejalan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak selalu mempertimbangkan situasi aktual di tingkat daerah. Hal ini terutama terjadi pada kebijakan tata ruang dan proses perizinan konsesi. Sebuah studi yang dilakukan oleh FWI (2018)31 di delapan

[30] https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081/angka-deforestasi-netto-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2020-hath-.html dan https://sigap.menlhk.go.id/sigap-trial/files/download/buku-deforestasi-indonesia-tahun-2020-2021.pdf

[31] FWI. 2018. Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia. Bogor.

provinsi32 menunjukkan sekitar 27% konsesi mengalami tumpang tindih izin antara konsesi hutan, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan.

- **Strategi dan program yang kurang terintegrasi antar sektor terkait**

  Sebagai kelanjutan dari masalah pengaturan kelembagaan di atas, kepentingan masing-masing sektor terkait seperti kehutanan, pertanian, dan energi dapat berbeda atau bahkan bertentangan. Hal ini menimbulkan masalah dalam menyelaraskan rencana kerja yang dipandang sebagai kepentingan satu sektor dan bukan banyak sektor, seperti kasus penurunan emisi GRK yang dipandang sebagai masalah lingkungan dan bukan masalah pembangunan. Cara pandang ini membuat upaya penurunan emisi GRK tidak menjadi perhatian instansi lain selain instansi lingkungan hidup, sehingga sering kali menghasilkan rencana yang tidak dapat diimplementasikan karena instansi yang bertanggung jawab tidak dapat melihat pentingnya hal tersebut.

- **Kurangnya dukungan pendanaan**

  Setelah lama diakui sebagai hambatan utama dalam upaya pelestarian lingkungan, pendanaan menjadi masalah utama dalam implementasi REDD+, terutama karena anggaran negara untuk mengatasinya terbatas. Sebagai contoh, pada tahun 2020, anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan hutan dan lingkungan hanya sebesar 0,9% dari total anggaran negara pada tahun tersebut. Persentase tersebut jauh lebih kecil di banyak provinsi.

  Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pendanaan inovatif telah dirancang untuk membantu langkah-langkah konservasi hutan di tingkat daerah. Banyak di antaranya sejalan dengan program REDD+. Meskipun ini merupakan peluang yang bagus, beberapa pendanaan tersebut disertai dengan ketentuan lebih banyak tindakan yang harus dilakukan atau lebih banyak dana yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dan mencapai persyaratan pendanaan. Oleh karena itu, kehati-hatian harus dilakukan ketika provinsi ingin terlibat dengan peluang ini.

  Dukungan dalam menerjemahkan persyaratan, termasuk mengidentifikasi implikasinya terhadap daerah juga diperlukan.

  Baru-baru ini, potensi pendanaan dari pasar karbon telah menarik perhatian banyak pelaksana kegiatan mitigasi perubahan iklim. Namun, keterbatasan pengetahuan dan ketidakpastian mengenai peraturan dan pasar, terutama bagi para pemangku kepentingan di tingkat daerah, membuat mereka ragu-ragu untuk melangkah lebih jauh.

"GCF [Gugus Tugas] telah membangun persatuan antara negara bagian dan provinsi dari tingkat subnasional melalui kesepakatan yang berasal dari berbagai komunitas dan menyebarkan hasilnya kepada masyarakat di seluruh dunia."

HUSAINI SYAMAUN
Mantan Kepala Dinas Kehutanan, Aceh, Indonesia

- **Kurangnya dukungan untuk inisiatif non-regulasi**

  Khususnya di area perkebunan, inisiatif seperti identifikasi dan alokasi area Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) dapat mengarah pada konservasi area tersebut. Hal ini pada gilirannya akan mengarah pada penghindaran emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan terkadang juga meningkatkan penyerapan dari kegiatan rehabilitasi. Sayangnya, meskipun inisiatif-inisiatif tersebut termasuk dalam Peta Jalan Kontribusi yang Diniatkan Secara Nasional (NDC) Indonesia sebagai salah satu kegiatan mitigasi yang potensial, inisiatif-inisiatif tersebut tidak memiliki dasar peraturan di tingkat nasional sehingga kapasitas penegakannya menjadi lemah. Hal ini sebagian besar bergantung pada permintaan berbasis pasar.

- **Kapasitas pemantauan yang terbatas untuk melacak status dan kinerja**

  Data adalah aspek kunci dalam pelacakan dan evaluasi. Sayangnya, banyak provinsi tidak memiliki sistem pemantauan yang memadai yang memungkinkan mereka untuk memperkirakan emisi hutan dengan benar, sehingga mereka tidak dapat secara teratur melacak status emisi hutan mereka dan selanjutnya, kinerja mereka dalam implementasi REDD+.

  Sistem Pemantauan Hutan Nasional (National Forest Monitoring System/NFMS) adalah sistem pemantauan tutupan hutan berbasis spasial yang digabungkan dengan pengamatan lapangan secara acak. Meskipun sistem ini sudah merupakan sistem yang komprehensif untuk menangkap perubahan tutupan hutan, resolusi gambarnya tidak cukup tinggi untuk estimasi yang lebih rinci. Sementara itu, di tingkat sub-nasional, anggaran yang terbatas menyulitkan untuk mempertahankan jumlah pengamatan lapangan (dalam hal lokasi dan frekuensi) yang representatif untuk menangkap dinamika pengelolaan hutan dan mengaitkannya dengan program/kegiatan tertentu.

[32] Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah

- **Kurangnya kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan di tingkat tapak**

  Pada tahun-tahun awalnya, REDD+ difokuskan pada tahap kesiapan, mempersiapkan kebijakan dan instrumen pendukung untuk pelaksanaannya. Selama tahap kesiapan ini, banyak kegiatan pengembangan kapasitas dan peningkatan kesadaran yang diselenggarakan, yang sebagian besar ditujukan untuk para akademisi dan pejabat pemerintah. Meskipun alasan dari pengaturan tersebut cukup baik, karena para akademisi dan pejabat pemerintah diharapkan dapat menjadi pelatih lokal dan dengan demikian menyebarluaskan pengetahuan, mereka tidak selalu menjadi pihak yang melakukan pekerjaan lapangan atau berada dalam posisi pengambil keputusan untuk mengatasi penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan.

  Sebagai contoh adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Saat ini terdapat 784 KPH33 di seluruh Indonesia. Sayangnya, tidak semua KPH memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola wilayahnya dengan baik, terlebih lagi untuk menghadapi semua pemangku kepentingan dan kegiatan yang berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan di wilayahnya.

- **Keanekaragaman budaya**

  Secara kolektif, ketujuh provinsi anggota GCF Task Force Indonesia merupakan rumah bagi hampir satu juta masyarakat adat, yang masing-masing memiliki bahasa, dialek, dan adat istiadatnya sendiri. Hal ini sering kali diterjemahkan ke dalam sudut pandang yang berbeda dan dengan demikian cara-cara yang berbeda pula dalam mengelola berbagai hal. Untuk mengatasi isu-isu tertentu, seperti konservasi hutan dan mengurangi perambahan, pendekatan yang berhasil di satu daerah tidak selalu dapat diterapkan di daerah lain. Situasi seperti ini mungkin juga terjadi di provinsi anggota GCF Task Force di negara lain, sehingga sesi berbagi yang menampilkan banyak contoh dapat membantu menginspirasi pengembangan pendekatan yang lebih luas.

Peluang / Dukungan Pendanaan Utama yang Dibutuhkan oleh Negara-negara Anggota Gugus Tugas GCF di Indonesia

- **Masyarakat dan Komunitas**
  - **Komite Pengarah untuk Masyarakat Adat & Komunitas Lokal (IPLC):**

    Didirikan pada tahun 2019, para anggota IPLC di Indonesia bekerja untuk meningkatkan kolaborasi antara para pemangku kepentingan terkait dan meningkatkan pengakuan terhadap hak-hak adat dan masyarakat setempat, termasuk integrasi wilayah yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang provinsi.

    IPLC juga akan bekerja untuk memfasilitasi pengembangan perhutanan sosial dan penyediaan peningkatan kapasitas membangun komunitas lokal untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif. Rencana jangka pendek IPLC di Indonesia adalah memberikan bantuan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam penerapan perhutanan sosial dan mengembangkan peluang ekonomi alternatif, seperti ekowisata dan hasil hutan non-kayu.

    Dukungan untuk memulai implementasi perhutanan sosial membutuhkan USD 35.000 per lisensi/izin, sementara itu, pengembangan kegiatan bisnis percontohan di komunitas lokal/adat membutuhkan setidaknya USD 300.000. Pekerjaan IPLC akan mencakup setidaknya 3 kegiatan percontohan hingga tahun 2030.

- **Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi**
  - **Jaringan penelitian dan pengetahuan:**

    Provinsi-provinsi anggota GCF Task Force sedang membentuk jaringan universitas. Pada tahap awal, jaringan ini akan berfokus pada universitas lokal di wilayah provinsi anggota. Selanjutnya, mereka akan membangun hubungan dengan universitas di daerah lain dan luar negeri. Untuk mendukung pertukaran dalam negeri, dibutuhkan dana sekitar USD 100.000 per tahun.

  - **Dukungan untuk sistem pemantauan REDD+:**

    Memiliki target pengurangan emisi dari implementasi REDD+ membutuhkan sistem pemantauan yang memadai untuk melacak kemajuannya, termasuk pengurangan emisi yang telah dicapai. Kalimantan Timur telah mengembangkan sistem pemantauan berbasis web melalui program Dana Karbon FCPF, tetapi provinsi lain belum memiliki kesempatan yang sama. Meskipun Kali- mantan Barat telah memulainya melalui dukungan dana dari Under2Coalition pada tahun 2021.

    Sistem pemantauan ini diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengukuran karbon hutan, tetapi juga mencakup pemantauan aspek sosial dan lingkungan lainnya sebagai bagian dari pengelolaan perlindungan REDD+.

    Metode untuk pemantauan dapat menggabungkan berbagai teknologi, seperti pemantauan hutan berbasis satelit atau aplikasi mobile untuk pengumpulan data lapangan dan penyediaan peringatan dini. Berdasarkan pengalaman di Kalimantan Timur, pengembangan sistem pemantauan akan membutuhkan dana sekitar 250.000 dolar AS per provinsi.

- **Keuangan, Investasi, dan Sektor Swasta**
  - **Eksplorasi dan pengembangan potensi bioekonomi potensi bioekonomi:**

    Di provinsi-provinsi anggota Indonesia, potensi bioekonomi akan dieksplorasi dengan fokus pada hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang diproduksi di daerah dikelola oleh KPH dan masyarakat lokal/adat.

[33] https://kph.menlhk.go.id/#/data-kph

Dukungan yang diperlukan untuk pengembangan ini antara lain bantuan dan pelatihan tentang inkubasi bisnis dan akses pasar, yang diperkirakan menelan biaya USD 200.000 untuk keseluruhan jaringan di tahun pertama, kemudian tambahan USD 400.000 per provinsi anggota untuk pengembangan lebih lanjut selama 4 tahun.

- **Dukungan untuk skema pembiayaan berkelanjutan yang inovatif:**
  Sebuah terobosan datang dari pemerintah provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019, yang memprakarsai implementasi program Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) yang disebut Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE). Melalui program ini, pemerintah provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan anggaran34 untuk didistribusikan ke pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung program dan kegiatan yang menangani isu-isu, antara lain, konservasi hutan, udara bersih, dan pengelolaan limbah. Inisiatif semacam ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat kabupaten dan kota dan dapat diadopsi oleh provinsi lain. Dukungan untuk persiapan inisiatif semacam ini akan membutuhkan dana sekitar USD 50.000 per provinsi selama 2 tahun.
- **Investasi dalam pengembangan ekowisata:**
  Sektor swasta dapat berinvestasi dalam pengembangan ekowisata untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai contoh, proyek Pengembangan Ekowisata Ma- rine di Papua bertujuan untuk mengembangkan inisiatif ekonomi berkelanjutan seperti bisnis sosial dan koperasi yang berfokus pada produk dan layanan yang berkelanjutan, seperti produk dari hutan bakau atau produk dari silvofishery. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk berinvestasi pada infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pengembangan ekowisata di kawasan hutan bakau. Dengan berinvestasi dalam ekowisata yang berkelanjutan, sektor swasta dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat lokal sambil melestarikan lingkungan.

➤ **Keuangan, Investasi, dan Sektor Swasta**

- **Dukungan untuk pengembangan model yurisdiksi & rencana rendah karbon**
  Pengembangan model yurisdiksi untuk pengurangan emisi telah dimulai di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sebagian besar untuk menangani langkah-langkah nol deforestasi dalam rantai pasokan minyak kelapa sawit. Namun, Kalimantan Barat juga sedang dalam proses mengembangkan model yurisdiksi yang lebih luas melalui dukungan pendanaan dari program Window B dan Green Climate Fund.

  Pemerintah Aceh, melalui dukungan pendanaan Window A, mengembangkan strategi pembangunan rendah karbon terpadu yang disebut ILEDSA (Integrated Low Emission Development Strate- gy for Aceh) yang mencoba mengarusutamakan isu-isu perubahan iklim ke dalam rencana kerja sektor-sektor terkait. Meskipun efektivitas strategi ini masih harus dilihat, proses perumusannya telah menyatukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan dari sektor-sektor terkait.

Kemitraan Utama

CDP

Kolaborasi dengan CDP dimulai dengan membantu provinsi-provinsi anggota dalam menjawab kuesioner CDP untuk negara bagian dan daerah pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2022, GCF Task Force Indonesia dan CDP memprakarsai pengembangan buku panduan kolaborasi untuk setiap provinsi, yang bertujuan untuk menampilkan program dan kegiatan potensial yang membutuhkan dukungan dan kemitraan.

Under2Coalition

Beberapa provinsi anggota GCF Task Force juga merupakan anggota Under2Coalition, dan selama bertahun-tahun kedua organisasi ini saling mengundang satu sama lain dalam acara-acara mereka dan berbagi informasi mengenai program-program mereka.

Satgas GCF di Indonesia juga bermitra dengan mitra-mitra teknis, antara lain The Nature Conservancy, Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Earth Inno- vation Institute (EII), Fauna & Flora International (FFI), dan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

[34] Dengan lima kabupaten dan kota, pada tahun pertama implementasi TAPE, pemerintah provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan sekitar tiga miliar rupiah (USD 220 juta). Secara bertahap, alokasi tersebut ditingkatkan hingga mencapai tujuh miliar rupiah (USD 518 juta) pada tahun 2023.

Aceh

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
56,839.09 [35]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
3,126.3 36

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
5,407,855 37

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
66.11% / 33.89%

ANGGOTA SEJAK
2009

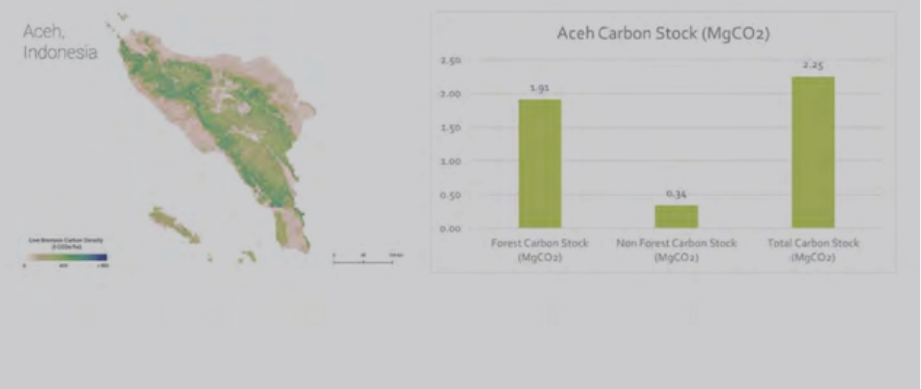

Kalimantan Tengah

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
153,443.9 [35]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
7,459.3 [39]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
2,741,100

POPULASI PEDESAAN / PERKOTAAN
57.80% / 42.20%

ANGGOTA SEJAK
2011

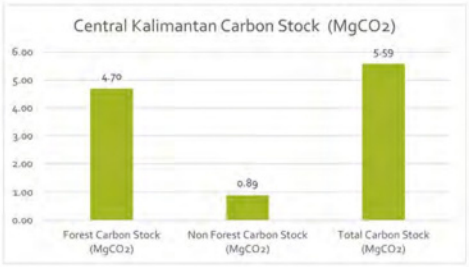

[35] Aceh in Figures 2023. https://aceh.bps.go.id/publication/2023/02/28/71d342c099d759579815e775/provinsi-aceh-dalam-angka-2023.html

[36] Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021. https://pktl.menlhk.go.id/publikasi/buku_statistik

[37] Aceh in Figures 2023. https://aceh.bps.go.id/publication/2023/02/28/71d342c099d759579815e775/provinsi-aceh-dalam-angka-2023.html

[38] Kalimantan Tengah dalam Angka 2023. https://kalteng.bps.go.id/publication/2023/02/28/45c828b0139ad2a9d3b848ca/provinsi-kaliman- tan-tengah-dalam-angka-2023.html

[39] Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021. https://pktl.menlhk.go.id/publikasi/buku_statistik

Kalimantan Timur

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
126,981.28 [40]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
13,289.5 [41]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
3,859,780 [42]

POPULASI PEDESAAN / PERKOTAAN
31.42% / 68.58%

ANGGOTA SEJAK
[2010]

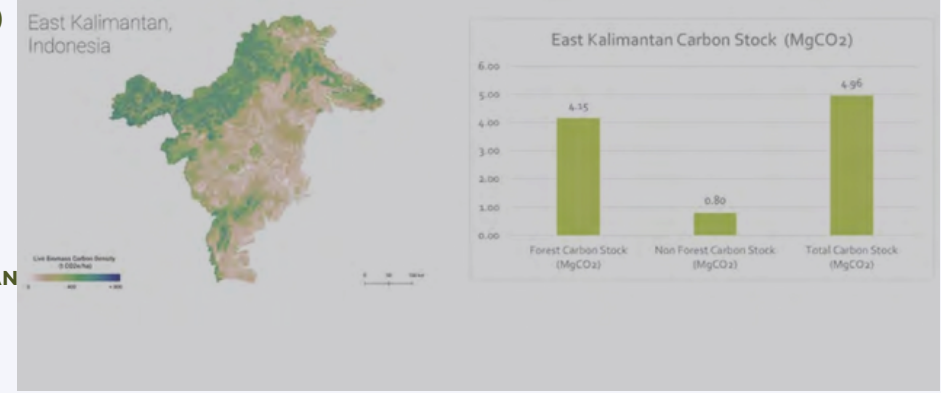

"Dengan adanya Satgas GCF ini tentu menjadi langkah bersama dalam mengatasi deforestasi di setiap daerah sebagai pengendalian perubahan iklim. Satgas GCF ini dinilai sangat penting oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena [partisipasi kami] merupakan salah satu bukti keseriusan dan perhatian kami dalam mengatasi perubahan iklim."

DR. IR. H. ISRAN NOOR
Mantan Gubernur, Kalimantan Timur Indonesia

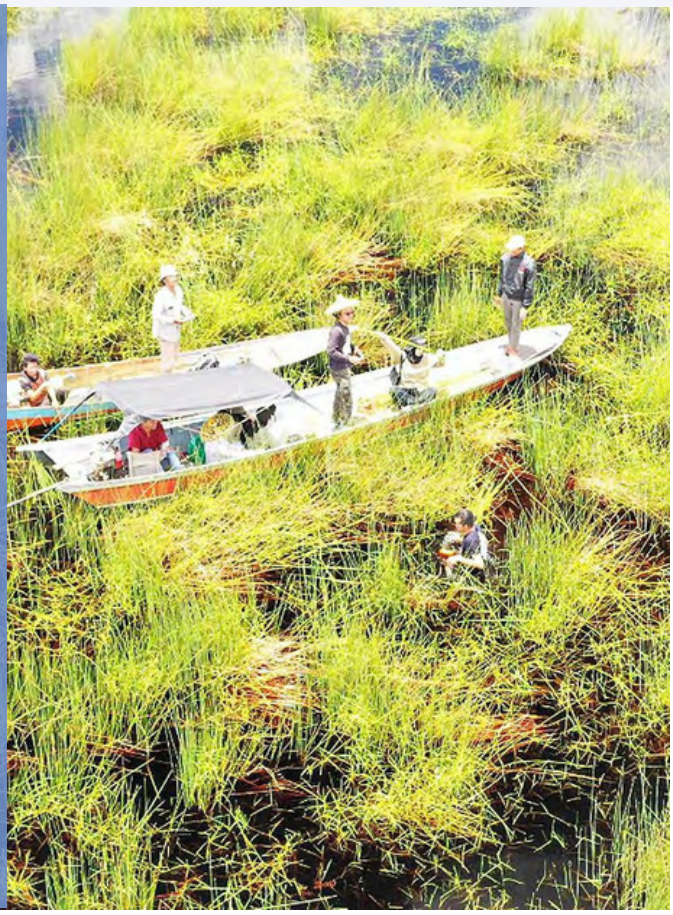

[40] Kalimantan Timur dalam Angka 2023. https://kaltim.bps.go.id/publication/2023/02/28/7a58231d5aa2f5a7b4d5c36a/provinsi- kaliman- tan-timur-dalam-angka-2023.html

[41] Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021. https://pktl.menlhk.go.id/publikasi/buku_statistik

[42] Kalimantan Timur dalam Angka 2023. https://kaltim.bps.go.id/publication/2023/02/28/7a58231d5aa2f5a7b4d5c36a/provinsi- kaliman- tan-timur-dalam-angka-2023.html

Kalimantan Utar

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
75,467.70 [43]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
13,289.5 [44]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
727,800 [45]

PENDUDUK PEDESAAN/PERKOTAAN
36.63% / 63.37%

ANGGOTA SEJAK
2016

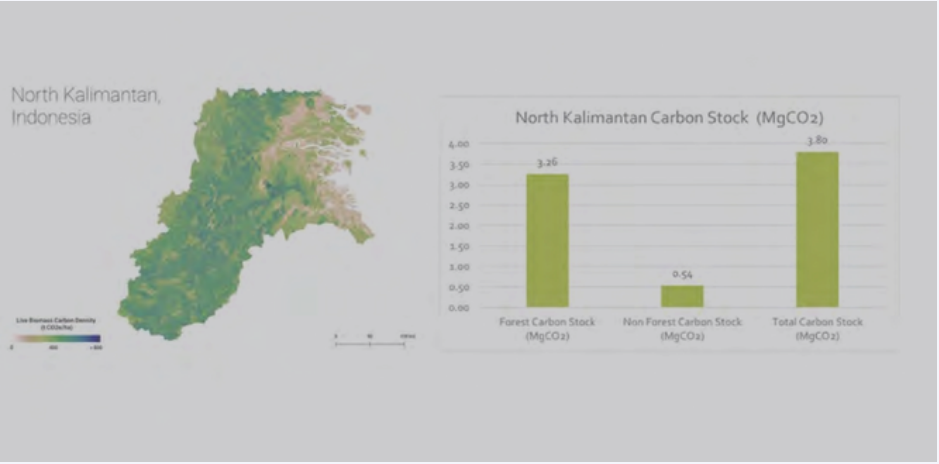

Kalimantan Barat

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
147,047.04

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
5,656.6 47

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
5,541,376 48

POPULASI PEDESAAN / PERKOTAAN
63.57% / 36.43%

ANGGOTA SEJAK
2010

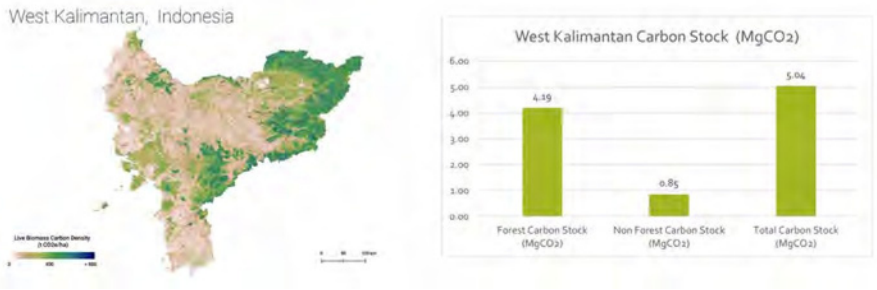

[43] Kalimantan Utara dalam Angka 2023. https://kaltara.bps.go.id/publication/2023/02/28/0eb3913ae2fe973d100fa04e/provinsi- kaliman- tan-utara-dalam-angka-2023.html

[44] Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021. https://pktl.menlhk.go.id/publikasi/buku_statistik

[45] Kalimantan Utara dalam Angka 2023. https://kaltara.bps.go.id/publication/2023/02/28/0eb3913ae2fe973d100fa04e/provinsi- kaliman- tan-utara-dalam-angka-2023.html

[46] Kalimantan Barat dalam Angka 2023. https://kalbar.bps.go.id/publication/2023/02/28/4f69da9b6275dd23c7edb485/provinsi-kaliman- tan-barat-dalam-angka-2023.html

[47] Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021. https://pktl.menlhk.go.id/publikasi/buku_statistik

[48] Kalimantan Barat dalam Angka 2023. https://kalbar.bps.go.id/publication/2023/02/28/4f69da9b6275dd23c7edb485/provinsi-kaliman- tan-barat-dalam-angka-2023.html

Papua

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
312,816.35 [49]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
25,396.6 [50]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
4,418,581 [51]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
69.80% / 30.20%

ANGGOTA SEJAK
2009

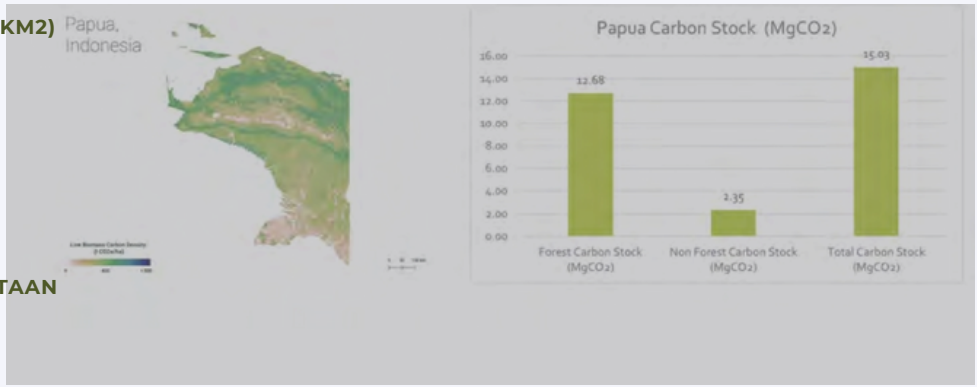

Papua Barat

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
99,398.26 52

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
8,967.3 53

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
1,183,307 54

POPULASI PEDESAAN / PERKOTAAN
57.23% / 42.77%

ANGGOTA SEJAK
2012

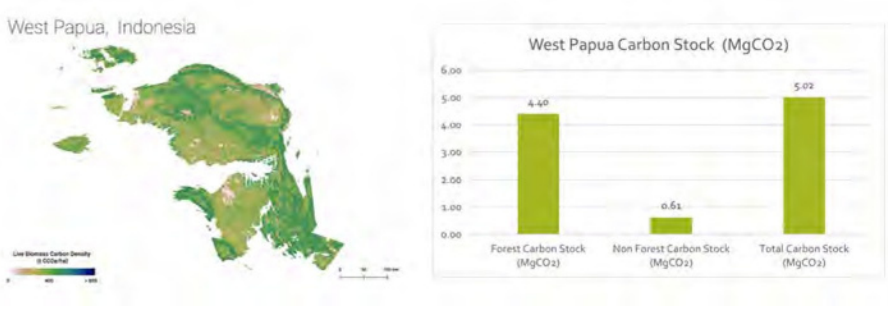

[49] Papua dalam Angka 2023. https://papua.bps.go.id/publication/2023/02/28/68b848a54207a64d0c42ddb6/provinsi-papua-dalam-ang- ka-2023.html

[50] Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021. https://pktl.menlhk.go.id/publikasi/buku_statistik

[51] Kalimantan Tengah dalam Angka 2023. https://kalteng.bps.go.id/publication/2023/02/28/45c828b0139ad2a9d3b848ca/provinsi- kaliman- tan-tengah-dalam-angka-2023.html

[52] Papua Barat dalam Angka 2023. https://papuabarat.bps.go.id/publication/2023/02/28/1675aaebd5ba59b4d6e1cdd3/provinsi-pap- ua-barat-dalam-angka-2023.html

[53] Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021. https://pktl.menlhk.go.id/publikasi/buku_statistik

[54] Papua Barat dalam Angka 2023. https://papuabarat.bps.go.id/publication/2023/02/28/1675aaebd5ba59b4d6e1cdd3/provinsi-pap- ua-barat-dalam-angka-2023.html

Meksiko

YURISDIKSI
Campeche, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, dan Yucatán

Ancaman dan Tantangan terhadap Konservasi Hutan dan Peningkatan Mata Pencaharian serta Pengurangan Kemiskinan (atau mendorong Pembangunan Rendah Emisi)

- Di Meksiko, marjinalisasi sosial di negara-negara anggota GCF Task Force menyiratkan adanya kebutuhan untuk memperoleh pendapatan, yang mengarah pada eksploitasi sumber daya secara ilegal. Untuk mengembangkan praktik-praktik pemanenan yang berkelanjutan, sangat penting untuk mendukung para pelaku lokal untuk membuat program-program pelatihan, ruang-ruang untuk refleksi dan integrasi, karena mereka belum tervisualisasikan dalam pengambilan keputusan dalam praktik-praktik kehutanan, terutama perempuan dan pemuda.
- Penyebab langsung utama deforestasi dan degradasi hutan adalah peternakan yang ekstensif, perluasan perbatasan pertanian dan praktik-praktiknya yang tidak berkelanjutan (untuk menghasilkan kelapa sawit, kedelai, jagung, alpukat, agave), pembalakan liar, eksploitasi sumber daya kayu dan non-kayu secara berlebihan, kebakaran hutan (yang disebabkan oleh manusia), dan perubahan penggunaan lahan. Pertumbuhan kota dan pembangunan infrastruktur, terutama di daerah wisata, merupakan sektor lain yang berkembang pesat dan berkontribusi terhadap perubahan penggunaan lahan.
- Analisis dampak pendorong deforestasi mengidentifikasi kebutuhan untuk: merancang kebijakan publik yang memungkinkan transformasi sektor-sektor produktif, mengembangkan mekanisme sertifikasi untuk produksi pertanian komersial dan skema pasar untuk membuat sistem produksi yang berkelanjutan menjadi lebih jelas dan memperluas sistem produksi yang berkelanjutan, memperkuat kapasitas dan pengetahuan yang terkait dengan mar- ket dan rantai nilai.
- Sektor pemerintah di Meksiko masih membutuhkan dukungan untuk memperkuat kapasitas yang diperlukan untuk menyoroti kekuatan dan peluang lokal (kota dan negara bagian) untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dan subsidi untuk program-program produktif semakin berkelanjutan, dengan memasukkan kriteria dan tujuan yang mendukung konservasi hutan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, penting untuk mendorong kepatuhan terhadap kerangka hukum dan peraturan, mengembangkan dan mengimplementasikan instrumen kebijakan publik lintas sektoral, mengembangkan mekanisme kerja sama antar pemerintah, dan membangun hubungan yang relevan dengan lembaga-lembaga kerja sama internasional.
- Terdapat kebutuhan akan instrumen dan mekanisme pembiayaan untuk menutupi, di satu sisi, biaya pelaksanaan proyek percontohan dan desain serta implementasi program untuk memperluas solusi, dan di sisi lain, menyediakan pembiayaan jangka panjang dan memadai untuk skema inovatif. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengintegrasikan peluang pembiayaan dari berbagai sumber keuangan (publik, swasta, nasional dan internasional, kredit dan subsidi) yang ditujukan untuk produsen dan masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan partisipasi dan manajemen inklusif kaum muda dan perempuan.

Peluang / Dukungan Pendanaan Utama yang Dibutuhkan oleh Negara-negara Bagian Gugus Tugas GCF di Meksiko

- **Masyarakat dan Komunitas**
  - Mempromosikan pengelolaan hutan lestari dan intensifikasi kegiatan pertanian untuk restorasi dan pemulihan ekosistem yang rusak, serta untuk peningkatan produktivitas dan ekonomi pedesaan.
    USD 8.000.000 selama 3 tahun [55].
- **Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi**
  - Mengembangkan protokol untuk rantai nilai yang berkelanjutan dan bebas deforestasi serta pedoman/ketentuan untuk ketertelusuran produk hutan dan pertanian.
  - Mengembangkan ruang inovatif untuk menghasilkan kapasitas dalam praktik-praktik produktif yang baik, tata kelola dan kewirausahaan bagi para produsen, untuk organisasi sosial dan beragam aktor di wilayah tersebut.
  - Menerapkan Sistem MRV Negara untuk pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan estimasi karbon, serta mengembangkan platform yang menghubungkan informasi dan data geospasial untuk analisis, konsultasi, dan pengambilan keputusan tentang proyek, tindakan, dan kebijakan publik pedesaan.

    USD 5.520.000 selama 3 tahun [56].

[55] Perincian untuk Masyarakat dan Komunitas: Campeche - USD 1.000.000; Chiapas - USD 1.274.000; Jalisco - USD 1.600.000; Oaxaca - USD 1.126.000; Quintana Roo - USD 1.000.000; Tabasco - USD 1.000.000; dan Yucatán - USD 1.000.000.

[56. Perincian untuk Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi: Campeche - USD 1.000.000; Chiapas - USD 1.250.000; Jalisco - USD 500.000; Oaxaca - USD 200.000; Quintana Roo - USD 1.000.000; Tabasco - USD 570.000; dan Yucatán - USD 1.000.000.

Kredit: Pronatura Sur

➤ **Keuangan, Investasi, dan Sektor Swasta**

- Mengidentifikasi dan mengakses beragam mekanisme pembiayaan untuk mengimplementasikan proyek-proyek REDD+.
- Mengidentifikasi dan mengakses pembayaran untuk model-model kinerja untuk mendukung strategi produksi berkelanjutan dan proyek-proyek yang dapat menunjukkan hasil

  USD 8.700.000 selama 3 tahun [57].

➤ **Pemerintah dan Kebijakan Publik**

- Memperkuat kelembagaan dan tata kelola yang memfasilitasi kolaborasi antar sektor dan implementasi kebijakan publik yang relevan untuk mencapai konservasi hutan.

  USD 1.719.000 selama 3 tahun [58].

Kemitraan Utama

Pembentukan aliansi dan kemitraan sangat penting untuk mengembangkan organisasi dan infrastruktur yang diperlukan untuk melacak dan memantau kemajuan, memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk mengisi kesenjangan dan merespons peluang baru, serta mengatasi hambatan dan memecahkan masalah.

Dalam hal ini, proses perencanaan yang dipromosikan oleh Satuan Tugas GCF telah memungkinkan untuk menyampaikan visi, garis strategis, dan pekerjaan Negara-negara sehingga aliansi dan pembiayaan yang fleksibel dan tepat waktu dapat dibentuk untuk menerjemahkan komitmen ke dalam tindakan yang efektif dalam menghadapi perubahan iklim, melindungi hutan tropis, dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat.

[57] Perincian untuk Keuangan, Investasi dan Sektor Swasta: Campeche - USD 900.000; Chiapas - USD 1.600.000; Jalisco - USD 1.000.000; Oaxaca - USD 1.600.000; Quintana Roo - USD 1.000.000; Tabasco - USD 1.000.000; dan Yucatán - USD 1.600.000.

[58] Perincian untuk Kebijakan Pemerintah dan Publik: Campeche - USD 300.000; Chiapas - USD 174.000; Jalisco - USD 170.000; Oaxaca -USD 111.000; Quintana Roo - USD 120.000; Tabasco - USD 122.000; dan Yucatán - USD 722.000.

Campeche

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
57,484.9 [59]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
4,330,835.34 (2022) [60]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
928,363 [59]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
25% / 75% [59]

ANGGOTA SEJAK
2010

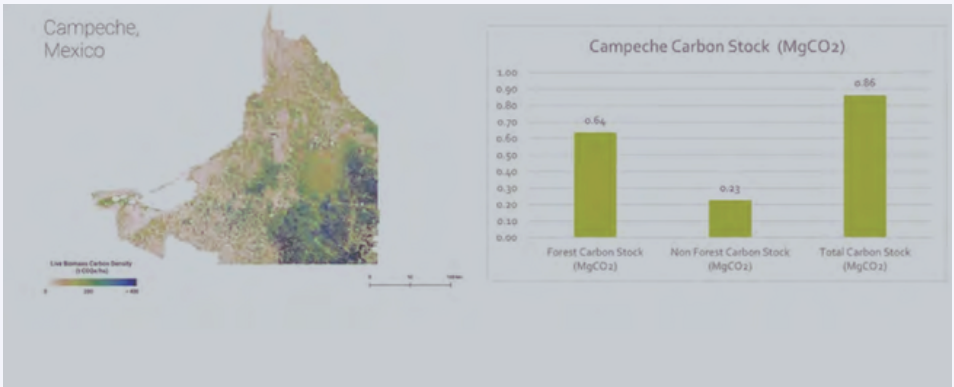

Chiapas

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
73,311.0 [59]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
3,585,555.07 (2022) [60]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
5,543,828 (2020) [59]

POPULASI PEDESAAN / PERKOTAAN
51% / 49% (2020) 59

ANGGOTA SEJAK
2011

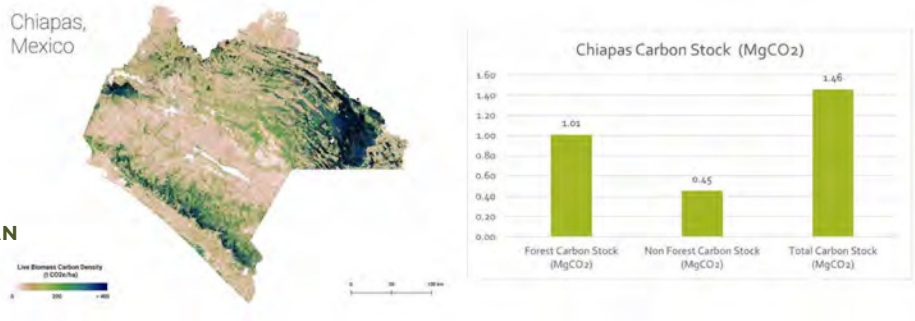

[59] Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), DataBosques **https://databosques.cnf.gob.mx/inicio/**

[60] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) - Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) 2015-2020. https://www.inegi.org.mx/

Jalisco

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
78,595.9 [59]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
4,546,511.5 (2022) [60]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
8,348,151 (2020) [59]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
12% / 88% (2020) 59

ANGGOTA SEJAK
2015

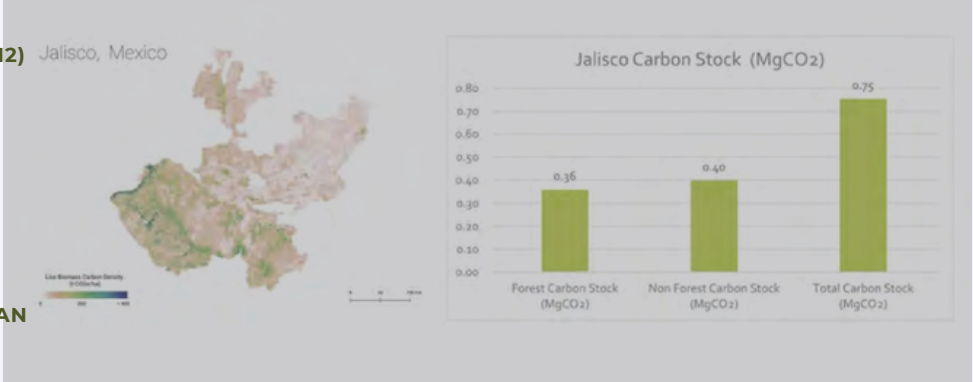

"Di Negara Bagian Jalisco, partisipasi dalam Satuan Tugas GCF telah menjadi hal yang fundamental dalam proses kesiapan REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi) dan dalam pembiayaan aksi-aksi implementasi. Tindakan-tindakan ini telah menghasilkan sinergi kolaboratif antara berbagai aktor dan telah mempengaruhi desain kebijakan publik yang mengatasi penyebab deforestasi."

SERGIO GRAF
Mantan Sekretaris Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah, Jalisco, Meksiko

Kredit: Pronatura Sur

Oaxaca

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
93,757.6 [59]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
6,692,729.99 (2022) [60]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
4,132,148 (2020) [59]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
51% / 49% (2020) [59]

ANGGOTA SEJAK
2017

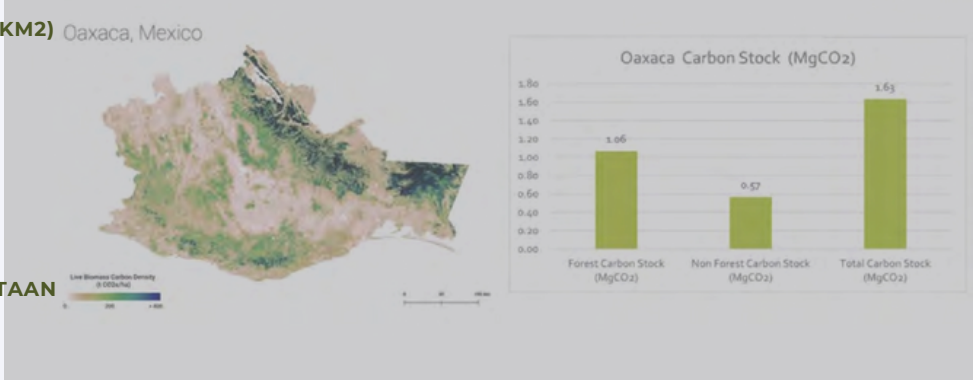

Quintana Roo

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
44,705.2 [59]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
3,877,252.91 (2022) [60]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
1,857,985 [59]

POPULASI PEDESAAN / PERKOTAAN
10% / 90% 59

ANGGOTA SEJAK
2015

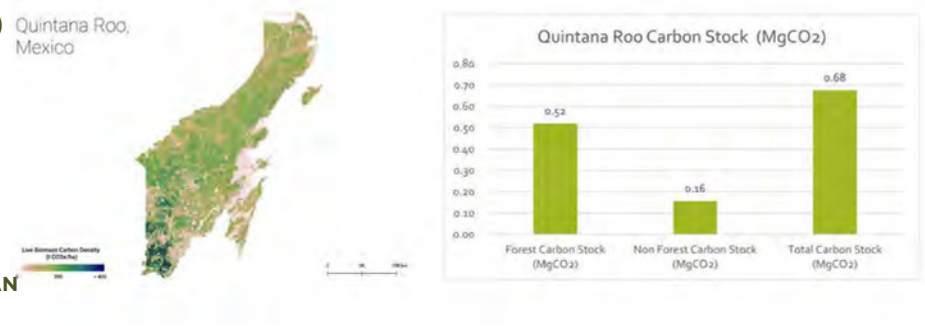

Tabasco

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
24,730.9 [59]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
817,154.13 [60]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
2,402,598 [59]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
41% / 59% [59]

ANGGOTA SEJAK
2016

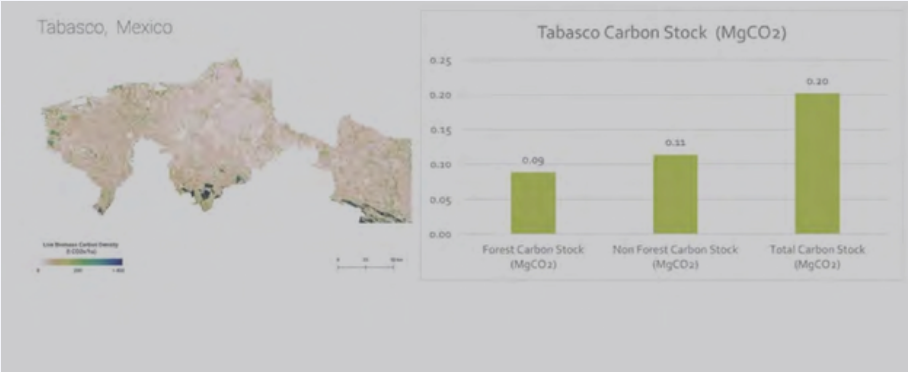

Yucatán

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
39,524.4 [59]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
2,694,374.54 (2022) [60]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
2,320,898 [59]

POPULASI PEDESAAN / PERKOTAAN
14% / 86% [59]

ANGGOTA SEJAK
2016

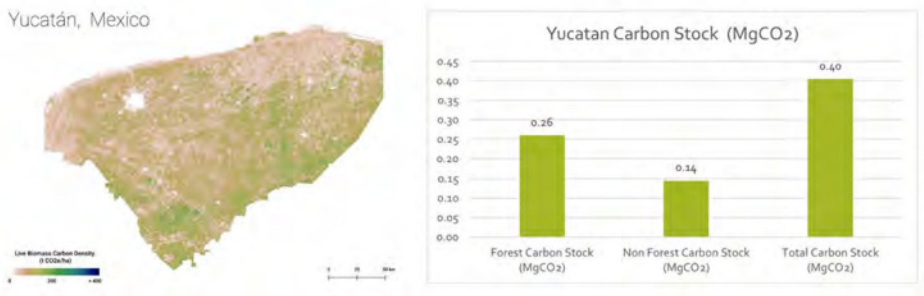

"Bekerja sama dengan tim GCF Task Force sejak awal pemerintahan saya... sangat penting untuk menciptakan aliansi dan upaya bersama untuk konservasi Hutan Maya. Satgas GCF telah memberikan dampak positif terhadap penggunaan sumber daya yang berkelanjutan bagi masyarakat kami, di mana kami dapat mengimplementasikan berbagai strategi dan program pemerintahan saya."

MAURICIO VILA DOSAL
Gubernur, Negara Bagian Yucatán

Nigeria

YURISDIKSI
Cross River

"Sudah menjadi filosofi GCF [Satuan Tugas] untuk memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memanfaatkan hutan dengan cara dan sikap yang baik sehingga hutan dapat tetap ada untuk mereka. Saya melihat semangat, saya melihat energi, saya melihat kegembiraan dari GCF [Gugus Tugas]. Saya melihat adanya komitmen dalam GCF [Gugus Tugas]."

BEN AYADE
Mantan Gubernur, Negara Bagian Cross River, Nigeria

Negara Bagian Lintas Sungai

TOTAL WILAYAH YURISDIKSI (KM2)
20,156

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
642,195 (2014) [61]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
4.406.204 (proyeksi tahun 2022) [62]

POPULASI PEDESAAN / PERKOTAAN
46.5% / 53.5% (2022) [63]

ANGGOTA SEJAK
2010

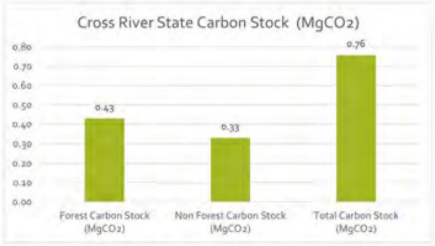

Ancaman dan Tantangan terhadap Konservasi Hutan dan Peningkatan Mata Pencaharian serta Pengurangan Kemiskinan (atau mempromosikan Pembangunan Rendah Emisi)

Proyek Pengungkapan Karbon (Carbon Disclosure Project/CDP)64 melaporkan bahwa Negara Bagian Cross River merupakan rumah bagi lebih dari 50% hutan yang masih ada di Nigeria, termasuk area hutan tropis yang luas, hutan pegunungan, sabana, dan rawa-rawa air asin. Wilayah ini ditetapkan sebagai salah satu dari 25 titik keragaman hayati dunia, dengan hutan bakau yang penting, mana- te, kuda nil, berbagai spesies burung, dan 23 spesies primata, termasuk populasi simpanse dan gorila Cross River yang penting. Pada saat yang sama, wilayah ini menghadapi laju deforestasi yang meningkat, terutama disebabkan oleh pembalakan liar, pertanian yang ekspansif, pemanenan kayu bakar yang tidak berkelanjutan, eksplorasi minyak dan mineral, dan pembangunan infrastruktur.

Ancaman dan tantangan utama terhadap konservasi hutan dan untuk mempromosikan pembangunan rendah emisi yang diidentifikasi oleh pemerintah Negara Bagian Cross River adalah:

- Pertanian ekstensif dan penggembalaan berlebihan.65 Pembukaan lahan untuk pertanian menyumbang lebih dari 80% dari total area hutan yang terdeforestasi setiap tahunnya. Hal ini terutama terjadi melalui pertanian tebang dan bakar.
- Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur mendorong permintaan sumber daya seperti makanan dan bahan bakar, dan mengakibatkan hilangnya habitat dan deforestasi untuk produksi makanan, kayu bakar, dan eksploitasi ilegal atas hasil hutan kayu dan non-kayu.
- Kebakaran hutan yang tidak terkendali dianggap sebagai penyebab utama hilangnya hutan. Kerusakan ekosistem hutan sebagian besar tidak terdokumentasi karena kurangnya data untuk menghitung secara penuh penipisan sumber daya hutan tahunan melalui kebakaran hutan yang tidak terkendali.

Peluang / Dukungan Pendanaan Utama yang Dibutuhkan oleh Satuan Tugas GCF Negara Bagian di Cross River:

Sejak tahun 2017, Negara Bagian Cross River telah mengidentifikasi berbagai intervensi dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan upaya implementasi kebijakan hutan serta mencapai tujuan hutan dan iklim jangka menengah (2017-2025) dan jangka panjang (2017-2030). Peluang- peluang ini diambil dari Strategi REDD+ Negara Bagian Cross River (disusun bersama dengan UN-REDD) (2017), Kebijakan Hutan yang Telah Divalidasi (2019), dan studi kasus CDP yang berjudul Negara Bagian Cross River: Aksi Iklim melalui Perlindungan Hutan. Jumlah pendanaan spesifik akan disertakan saat tersedia.

[61] Strategi REDD+ Negara Bagian Lintas Sungai - Program REDD PBB. https://www.un-redd.org/sites/default/files/2021- 10/CRS%20REDD%2B%20Strategy%20FINAL%202%20MB%20%28722175%29.pdf
[62] Sasu, D. D. (2023, September 6). Nigeria: Perkiraan populasi 2025-2050. Statista. https://www.statista.com/statistics/1122955/fore- cast-population-in-nigeria/#:~:text=Dalam%202022%2C%20Nigeria's%20population%20was,million%20people%20compared%20to%202022.
[63] Nigeria; Data Terbuka Bank Dunia. https://data.worldbank.org/country/NG
[64] Negara Bagian Lintas Sungai: Aksi Iklim Melalui Perlindungan Hutan. CDP. (n.d.). https://www.cdp.net/en/articles/states-and-regions/cross-river- aksi-iklim-negara-bangsa-melalui-perlindungan-hutan
[65] Kebijakan Kehutanan Lintas Negara Bagian yang Disahkan 2019. DP. https://policycommons.net/artifacts/3832139/cross-river-state-validated-forest-policy-2019/4638076/

Kesempatan-kesempatan ini meliputi:

- **Masyarakat dan Komunitas**
  - Mendukung Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, yang memberikan pelatihan tentang pilihan mata pencaharian seperti pemeliharaan kebun rumahan, wanatani, peternakan lebah, peternakan siput, dan budidaya sayuran yang dapat dimakan seperti bayam. Program-program ini juga mencakup pemetaan tata guna lahan hutan untuk pengelolaan lahan dan sumber daya hutan yang tepat. Program REDD+ berbasis masyarakat yang telah lama berjalan termasuk insentif untuk restorasi hutan bakau, serta pelatihan mengenai peralatan untuk budidaya kakao dan singkong yang lebih berkelanjutan.
  - Mendukung program Pengelolaan Kayu Bakar Berkelanjutan (SFM): Negara Bagian Cross River telah bekerja sama dengan Global Environment Facility (GEF) dan United Nations Development Programme (UNDP), serta kelompok tani dan masyarakat setempat, untuk mengembangkan kapasitas di bidang wanatani, pengelolaan penggunaan lahan, penanaman pohon yang tumbuh cepat khusus untuk kayu bakar, dan produksi tanaman.
- **Keuangan, Investasi, dan Sektor Swasta**
  - Mendukung pengembangan aliran pendapatan baru seperti pembayaran regional untuk program jasa ekosistem, pasar karbon, membawa hasil hutan non-kayu ke pasar, dan ekowisata yang terkait dengan upaya pengelolaan hutan dalam rangka mengurangi tekanan terhadap hutan untuk penebangan liar (atau untuk mencabut larangan terhadap kegiatan penebangan saat ini).
  - Mengembangkan dan memperkuat mekanisme pelacakan kepatuhan sektor swasta terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan konservasi di Negara Bagian Cross River, khususnya yang terkait dengan perlindungan lingkungan.
- **Pemerintah dan Kebijakan Publik**
  - Memperkuat kapasitas dan sumber daya yang membantu mekanisme penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan praktik-praktik penggunaan lahan ilegal lainnya, termasuk di hutan lindung, hutan kemasyarakatan, dan kawasan lindung.
  - Memperkuat hubungan kelembagaan (di dalam pemerintah dan dengan pemangku kepentingan terkait), efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam tata kelola hutan.

Kemitraan Utama

Antara lain, mitra-mitra Cross River State dalam berbagai jaringan, seperti Regions4, Under2Coalition, GCF Task Force, Global Environment Facility, berbagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti Program Pembangunan PBB (UN-REDD Programme), Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization), dan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility), berbagai organisasi nirlaba seperti Wildlife Conservation Society (Masyarakat Konservasi Margasatwa), kementerian dan badan-badan pemerintah pusat, serta organisasi-organisasi masyarakat setempat dan masyarakat pedesaan.

Kredit: Shiraz Chakera

Peru

YURISDIKSI
Amazonas, Huánuco, Loreto, Piura, Madre de Díos, San Martín, Ucayali

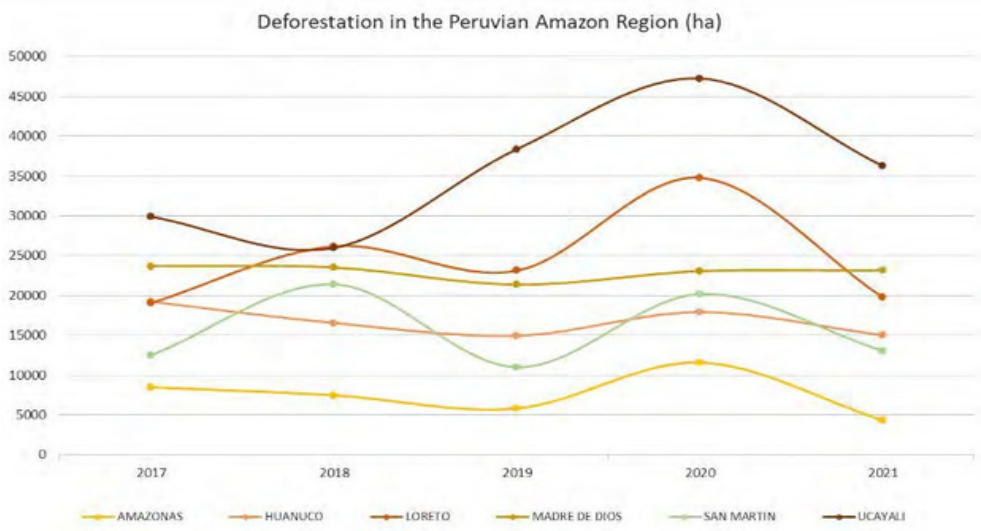

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup, tersedia di platform Geobosques. Elaborasi oleh GCF TF.

Ancaman dan Tantangan terhadap Konservasi Hutan dan untuk Mempromosikan Mata Pencaharian dan Mengurangi Kemiskinan atau mempromosikan Pembangunan Rendah Emisi

- Pada tahun 2021, Hutan Amazon Peru mencatatkan total 67 juta hektar tutupan hutan, sementara hilangnya hutan lembab di 6 wilayah Amazon yang menjadi bagian dari Satuan Tugas GCF di Peru mencapai 111.732 hektar, yang mewakili 27,80% dibandingkan dengan kehilangan hutan yang dilaporkan pada tahun 2020 untuk wilayah-wilayah tersebut. Pertumbuhan deforestasi pada tahun 2020 merupakan yang tertinggi dalam dua dekade terakhir di Peru dan secara langsung terkait dengan pandemi Covid-19. Sementara pada tahun 2021, tingkat deforestasi berkurang dibandingkan tahun 2020 di semua wilayah kecuali di Madre de Dios, dengan sedikit peningkatan. Peningkatan jumlah penambang di yurisdiksi seperti Amazonas dan Madre de Dios cukup mengkhawatirkan.
- Penebangan liar dan komersialisasi produk turunannya telah menyebar di Amazon, terutama di Loreto, Madre de Dios, dan Ucayali. Kegiatan ilegal ini terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, pemalsuan dokumen, kejahatan terorganisir dan pencucian uang.
- Narkotika merupakan ancaman lain bagi Peru karena perluasan penanaman koka di wilayah hutan. Daerah pedesaan seperti perbatasan tiga negara antara Peru, Brasil, dan Kolombia berada dalam situasi yang rentan dan miskin. Kegiatan ilegal ini juga terkait dengan pendudukan lahan ilegal, perdagangan satwa liar, dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan negara untuk melakukan substitusi tanaman sebagai tindakan untuk mengekang tanaman ilegal juga membutuhkan dukungan dari sayap bersenjata negara melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk intervensi mereka dengan polisi dan angkatan bersenjata dalam melindungi masyarakat adat yang rentan terhadap kejahatan terorganisir.

Peluang / Dukungan Pendanaan Utama yang Dibutuhkan oleh Negara-negara Anggota GCF di Peru:

- **Masyarakat dan Komunitas**

  Organisasi-organisasi IPLC utama di tingkat nasional - Aidesep, Anecap, dan Conap - membentuk Kelompok IPLC Peru, yang bekerja melalui koordinasi dengan Gugus Tugas GCF untuk pengembangan kegiatan dan penyebaran informasi tentang Masyarakat Adat.Kelompok Masyarakat

Adat Peru Group of Indigenous Peoples menyebarluaskan pekerjaannya melalui strategi REDD+ Masyarakat Adat Amazon, memperkuat kapasitas dan pengetahuan para pemimpin masyarakat adat dalam aspek teknis, politik dan REDD+, dan dengan memasukkan visi jangka panjang untuk meningkatkan otonomi masyarakat adat. Di wilayah Loreto, tujuannya adalah untuk mempromosikan produksi Shiringa dalam pemulihan area produktif dengan partisipasi masyarakat adat, yang mana biaya pelaksanaannya diperkirakan sebesar 2 juta dolar dalam 2 tahun. Ada kebutuhan untuk bekerja pada penggunaan dataran lumpur di daerah yang berdekatan dengan sungai dengan potensi tanaman pertanian, untuk memperkuat kepemimpinan masyarakat asli melalui pengawasan hutan dan untuk mengurangi deforestasi migrasi dengan biaya implementasi perkiraan sebesar 4 juta dolar dan jangka waktu implementasi 2 tahun.

Di Amazonas, kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan teritorial telah diidentifikasi di Unit Pengembangan Teritorial Awajum Wamp- is di provinsi Condorcanqui, dalam rangka memberantas kegiatan ilegal (pertambangan ilegal, perdagangan kayu ilegal, dan perdagangan narkoba), yang meningkatkan rasa tidak aman dan integritas para pemimpin. Pembela lingkungan hidup masyarakat adat.

Intervensi ini diproyeksikan akan memakan waktu sekitar 2 tahun, dengan biaya 2 juta dolar.

- Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi

Pada bulan Oktober 2023, Satuan Tugas GCF menyelenggarakan lokakarya biobisnis dengan mitra dari pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, yang menguraikan peta jalan untuk biobisnis di negara ini. Tujuan dari peta jalan ini adalah untuk mengembangkan program diploma selama satu tahun tentang biobisnis dan biotrade untuk memperkuat kapasitas teknis tim di daerah. Berupaya meningkatkan praktik produksi yang baik dan menerapkan teknik dan teknologi baru di wilayah San Martin, salah satu prioritas yang diidentifikasi adalah pengembangan "Program RIE" untuk menerapkan praktik-praktik produktif menggunakan irigasi berteknologi dengan pendekatan pertanian rendah karbon dan mempertimbangkan perlindungan, artikulasi dengan strategi pembangunan pedesaan rendah emisi, serta pembangunan sistem pemantauan yang diproyeksikan selama 10 tahun di lahan-lahan milik para produsen kecil yang memenuhi komitmen terhadap produksi rendah emisi. Pelaksanaan program ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar USD 6,6 juta dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun. Selain itu, di Amazonas, perlu dilakukan investasi

dalam peningkatan pengelolaan wilayah dalam yurisdiksi melalui penerapan sistem pemantauan untuk memastikan pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati yang berkelanjutan - 3 tahun - USD 4 juta.

- **Keuangan, Investasi, dan Sektor Swasta**

  Untuk mengimplementasikan proyek-proyek yang berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan kerja sama internasional, dan untuk meningkatkan proses produktif dalam berbagai rantai berkelanjutan yang diidentifikasi di Amazon, organisasi mitra seperti WWF dan TFA, mengimplementasikan proyek ternak hidup di Madre de Dios. Proyek ini berusaha untuk mengubah metode peternakan konvensional menjadi proses peternakan regeneratif di provinsi Iñapari Sejalan dengan pengalaman yang dikembangkan di Madre de Dios, wilayah Huánuco telah mengidentifikasi kebutuhan untuk mengimplementasikan model ini pada peternakan generatif, yang diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 2 juta dolar untuk periode implementasi selama dua tahun. Untuk mengimplementasikan percontohan bioekonomi, investasi sebesar 6 juta dolar AS selama 3 tahun di setiap wilayah, dengan harapan dapat menjangkau hingga 3 wilayah.

  Untuk meningkatkan profitabilitas dalam rantai nilai produksi buah-buahan (lemon, nanas dan jeruk) di 10 provinsi di wilayah San Marin, dibutuhkan investasi sebesar USD 4,2 juta untuk memperkuat berbagai bisnis.

- **Kebijakan Pemerintah dan Publik**

  Gugus Tugas GCF mendukung Persemakmuran Regional Amazon dan aktor masyarakat sipil lainnya untuk bertemu dan mendiskusikan aliran kerja prioritas di wilayah Amazon, memutuskan pembentukan kelompok-kelompok tematik untuk mengkatalisasi kegiatan dan tujuan pemerintah daerah di Amazon Pe- ruvian. Kelompok-kelompok ini dibagi menjadi 7 tema utama, yaitu:

  - Rantai produksi yang kompetitif dan berkelanjutan -
  - Pariwisata Alam
  - Konektivitas Amazon yang Berkelanjutan
  - Masyarakat Adat dan Alokasi Hak
  - Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan - Kegiatan yang
  - Melanggar Hukum dan Akses terhadap Keadilan
  - Biobisnis & Ekonomi Sirkular

Kemitraan Utama

Di Peru, Satuan Tugas GCF bekerja sama dengan Persemakmuran Regional Amazon (MRA), yang memiliki visi 2050 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Amazon dengan pendekatan yang kompetitif dan adil, dengan perhatian khusus pada penduduk pedesaan dan masyarakat adat. Jaringan ini juga bermitra dengan organisasi-organisasi yang bekerja untuk pembangunan Amazon yang produktif dan berkelanjutan, termasuk Tropical Forest Alliance dan WWF Peru dalam rantai nilai peternakan regeneratif, Earth Innovation Insti- tute di Loreto, San Martín, dan Ucayali dalam berbagai proyek, seperti proyek Amazonia Connect yang bertujuan untuk mendorong produksi pertanian rendah karbon pada kelapa sawit (Ucayali) dan kakao (San Martín).

Amazonas

KM2)

TOTAL LUAS WILAYAH (RIBU KM2)
39.22 [66]
TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
2,814,385.57 67]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
379,384 [66]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
58% / 42% [66]

ANGGOTA SEJAK
2015

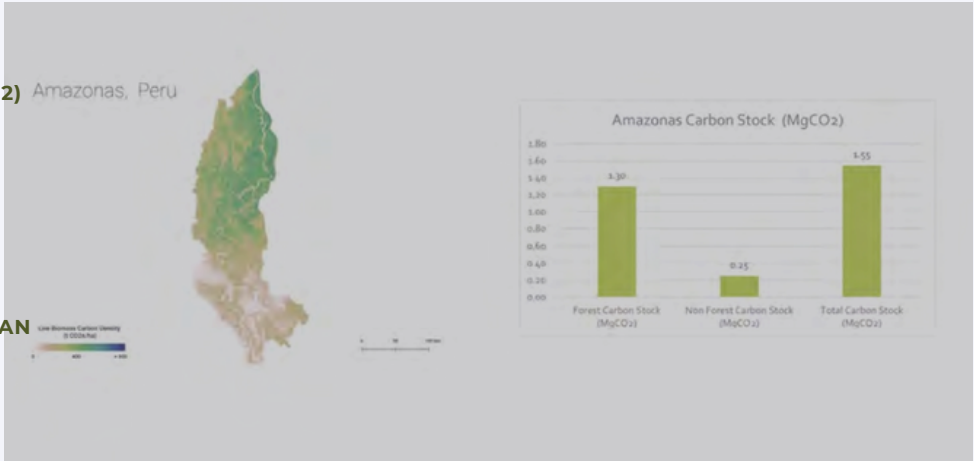

Huánuco

KM2)

TOTAL LUAS WILAYAH (RIBU KM2)
37.3 [66]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
1,513,103.54 [67]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
721,047 66

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
48% / 52% [66]

ANGGOTA SEJAK
2016

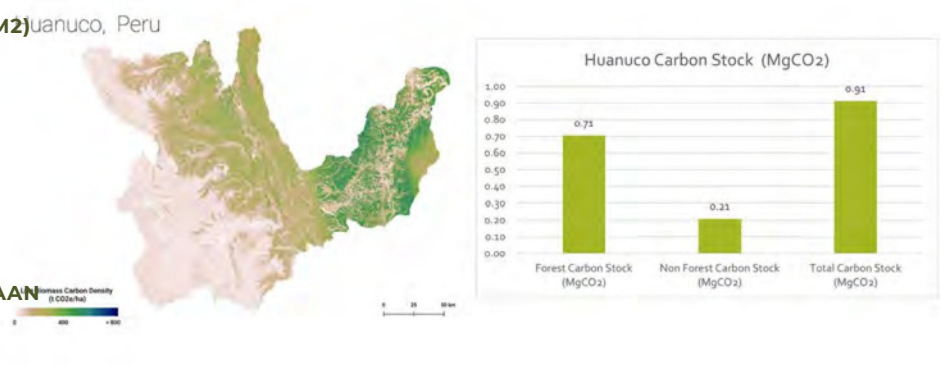

[66] Instituto Nacional de Estadística e Informática - inei. INEI - Plataf orma del Estado Peruano. (n.d.). https://www.gob.pe/inei

[67] Plataforma Monitoreo de cambios tentang Cobertura de los Bosques. Geobosques. (n.d.-a). https://geobosques.minam.gob.pe/geo-bosque/view/index.php

Loreto

TOTAL LUAS WILAYAH (RIBU KM2)
368.8 [66]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
34,990,024.23 [67]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
883,510 [66]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
31% / 69% [66]

ANGGOTA SEJAK
2014

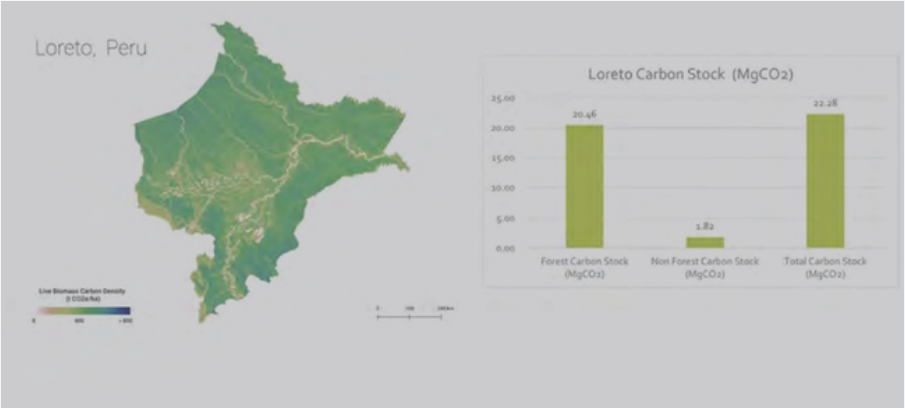

Madre de Dios

TOTAL LUAS WILAYAH (RIBU KM2)
85.3 [66]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
7,861,327.02 [67]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
141,070 [66]

POPULASI PEDESAAN / PERKOTAAN
17% / 83% [66]

ANGGOTA SEJAK
2012

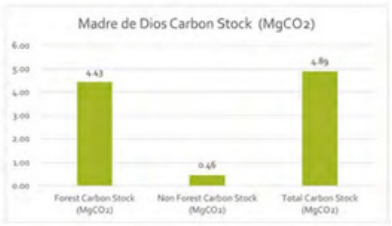

Piura

TOTAL LUAS WILAYAH (RIBU KM2)
35.7 [66]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
41,397.56 [67]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
384,976 [66]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
21% / 79% 66

ANGGOTA SEJAK
2016

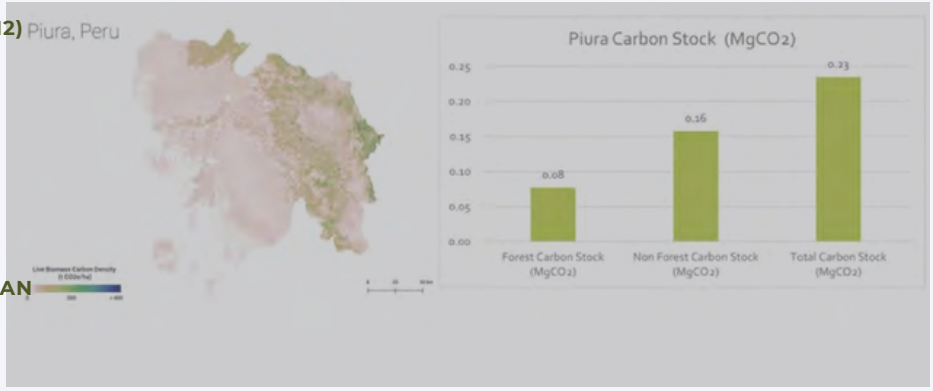

San Martín

TOTAL LUAS WILAYAH (RIBU KM2)
51.33 [66]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
3,313,356.56 [67]

YURISDIKSI POPULASI TOTAL
813.381 [66]

POPULASI PEDESAAN / PERKOTAAN
32% / 68% [66]

ANGGOTA SEJAK
2014

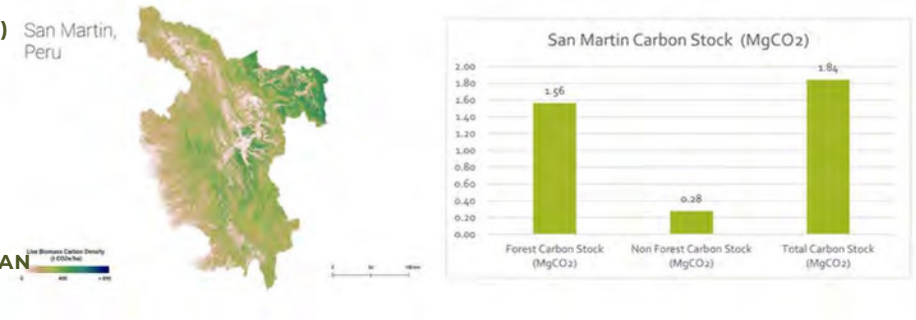

"Tidak diragukan lagi bahwa tindakan positif di tingkat subnasional membantu menciptakan spiral ke atas yang melibatkan dan beresonansi dengan pemerintah nasional."

HM RAJA CHARLES III

Bagian dari pidato yang diberikan oleh HM Raja Charles III (sebagai HRH The Prince of Wales) pada KTT Iklim Global Gubernur 3 pada bulan November 2010.

Ucayali

TOTAL LUAS WILAYAH (RIBU KM2)
102.2 [66]

TOTAL TUTUPAN HUTAN (HA)
9,251,129.58 [67]

TOTAL POPULASI
496,459 [66]

POPULASI PEDESAAN/PERKOTAAN
19% / 81% 66

ANGGOTA SEJAK
2014

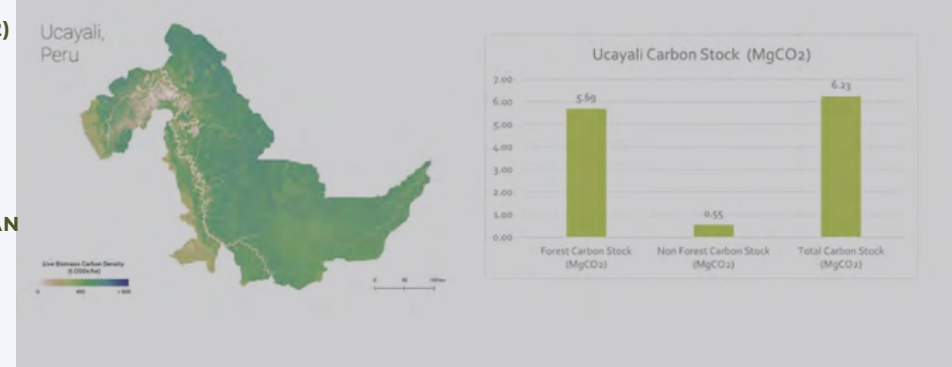

Kredit: Gugus Tugas GCF Sekretariat Global

Kredit: Pemerintah Negara Bagian, Yucatán, Meksiko

Kolaborasi Lintas Batas

Di era yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keterkaitan global, kolaborasi lintas batas telah menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan lingkungan yang melampaui batas- batas negara dan nasional. Kolaborasi ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari operasi bersama untuk memerangi pertambangan ilegal, penebangan hutan, dan kejahatan lingkungan hingga menegakkan langkah-langkah pengawasan perbatasan dan mengatur pasar internasional untuk produk yang sensitif terhadap lingkungan. Sifat kompleks dari tuntutan ini menuntut pendekatan interdisipliner yang menggabungkan keahlian dari berbagai sektor, termasuk penegakan hukum, ilmu lingkungan, peraturan perdagangan, dan diplomasi.

Seiring Satgas GCF terus mengembangkan peluang untuk meningkatkan kolaborasi lintas batas, kami mendapatkan pelajaran penting yang diambil dari pengalaman praktis di lapangan. Pelajaran-pelajaran ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarpemerintah, potensi penerapan teknologi mutakhir, dan penerapan kerangka kerja hukum yang kuat untuk memerangi kegiatan ilegal secara efektif. Masing-masing daftar negara di bawah ini menyoroti kebutuhan material untuk membina kerja sama di antara negara bagian dan negara, karena tantangan lingkungan sering kali terlalu luas dan rumit untuk ditangani oleh satu negara bagian, provinsi, atau negara secara mandiri. Mengidentifikasi cara-cara untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan ini akan membantu kita dalam mengembangkan rencana implementasi lintas batas yang akan memberikan sumbangsih dalam menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, saling terhubung, dan bertanggung jawab secara ekologis.

Kredit: Sekretariat Global Gugus Tugas GCF

BOLIVIA

Di Bolivia, yurisdiksi anggota kami telah membuat daftar bidang-bidang yang perlu dikolaborasikan:

- Membentuk platform internasional untuk mencegah perdagangan dan perdagangan produk yang bersumber dari kawasan lindung secara ilegal, seperti kayu, perdagangan keanekaragaman hayati hewan dan produk makanan (Castaña, Acai, Almendra Chiquitana), dan pertukaran sumber daya bioekonomi lainnya.
- Rencana aksi tanggap darurat internasional untuk masyarakat yang rentan terhadap kekeringan, banjir, kebakaran hutan, kegiatan ilegal, dan kejahatan terorganisir untuk negara-negara yang berbatasan dengan Bolivia (Brasil, Peru, Paraguay).
- Rencana kerja sama internasional untuk cekungan air dan pasokan air, serta perlindungan keanekaragaman hayati, seperti koridor satwa liar untuk jaguar dan spesies lainnya.
- Meningkatkan pertukaran pengalaman dan transfer pengetahuan di antara para anggota Satuan Tugas GCF.

BRAZIL

Di Brasil, kami melihat adanya kebutuhan mendesak akan kerja sama lintas batas, khususnya dalam kerangka kerja Konsorsium Antarnegara Bagian untuk Pembangunan Berkelanjutan Amazon Legal. Kolaborasi ini diperkirakan akan melibatkan beberapa tindakan utama, yaitu:

- Pengembangan Protokol Inspeksi Terpadu: Membuat protokol inspeksi standar yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh perbatasan negara sangat penting untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya di wilayah Amazon.
- Pemantauan Terpadu Bersama: Membangun upaya pemantauan bersama dan terpadu di daerah-daerah kritis dan di sepanjang perbatasan antarnegara bagian akan membantu mengatasi tantangan lingkungan secara lebih efektif dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
- Unit Intelijen Teritorial Regional: Membentuk unit intelijen teritorial regional yang didedikasikan untuk memberantas kegiatan ilegal sangat penting. Unit ini akan mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mencegah dan mengatasi masalah seperti penambangan ilegal, pembalakan, dan kejahatan lingkungan lainnya.
- Menyelaraskan Kerangka Hukum Negara: Menyelaraskan kerangka hukum negara untuk memfasilitasi tindakan terpadu sangat diperlukan untuk kerja sama lintas batas yang efisien dan penegakan hukum lingkungan.
- Koordinasi dengan Tingkat Pemerintahan Lainnya: Koordinasi yang efektif dengan tingkat pemerintahan lainnya, termasuk otoritas lokal dan federal, sangat penting untuk memastikan pendekatan yang komprehensif dan selaras dalam mengatasi tantangan lingkungan.
- Tindakan Tempur Terpadu: Menerapkan tindakan tempur terpadu, termasuk upaya polisi regional dan pembentukan pangkalan strategis antarnegara bagian, akan memainkan peran penting dalam memerangi tindakan terlarang dan melestarikan sumber daya alam di wilayah Amazon.
- Langkah-langkah ini secara kolektif bertujuan untuk memperkuat kerja sama lintas batas dan mengatasi tantangan yang kompleks dan beragam yang dihadapi wilayah Legal Amazon.

COLOMBIA

Di Kolombia, bidang-bidang utama yang perlu ditingkatkan kerja sama lintas negara meliputi:

- Memperkuat pertukaran komersial yang berasal dari kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan di antara negara-negara Amazon yang berbatasan.
- Pertukaran pengetahuan untuk memperkuat sistem produksi dan rantai pasokan.

ECUADOR

Platform Amazon untuk Hutan, Iklim, dan Kesejahteraan Manusia merupakan kesepakatan kolaboratif antara enam provinsi di Amazon Ekuador dan Konfederasi Kebangsaan Pribumi Am- azon Ekuador (CONFENIAE, yang terdiri atas 11 kebangsaan pribumi) untuk melestarikan dan menyediakan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat adat di Amazon Ekuador. Pada tahap pertama dari pakta ini, tiga provinsi yang tergabung dalam Satuan Tugas GCF, Pastaza, Zamora Chinchipe, dan Morona Santiago, telah berkomitmen untuk secara efektif mengelola dan melindungi 11 juta hektar hutan lestari, yang merupakan koridor biologis terbesar hutan lestari di Ekuador dan menyerap sekitar 2,3 miliar ton karbon.
Kawasan lindung provinsi Morona Santiago, Pastaza, dan Zamora Chinchipe dibuat dan dikelola untuk mencerminkan visi kosmopolitan masyarakat adat dan pengetahuan ekologi leluhur serta praktik-praktik pengelolaan. Zonasi wilayah dan prioritas pengelolaan masyarakat adat diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan kawasan lindung, yang belum pernah terjadi sebelumnya di Ekuador.

Di Morona Santiago, wilayah ini menghadapi masalah penyelundupan bahan bakar dan penebangan kayu tanpa pandang bulu di kanton Tiwin- tza yang berbatasan dengan Peru, dan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan kontrol perbatasan dan strategi advokasi. Bagi Pastaza, memperkuat inisiatif Amazon Platform akan meningkatkan hasil lingkungan dan mata pencaharian di negara-negara yang berbatasan. Hal ini harus diimplementasikan dalam koordinasi dengan mengidentifikasi dan mendorong pelaksanaan proyek konservasi regional Amazon, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola wilayah. Di Zamora Chinchipe, kebutuhan lintas batas yang paling mendesak adalah pengelolaan terpadu daerah aliran sungai binasional, penetapan batas atau solusi untuk masalah perbatasan (Advokasi Nasional), memperkuat kontrol terhadap perdagangan senjata, narkoba, bahan bakar, dan kayu, serta mendorong pertukaran budaya antar masyarakat dan bangsa.

INDONESIA

Anggota Satgas GCF di Indonesia berada di tiga pulau utama: satu provinsi anggota di Suma- tra, empat di Kalimantan, dan dua di Papua. Memiliki kawasan hutan yang berbatasan satu sama lain membutuhkan kerja sama di antara provinsi-provinsi anggota. Salah satu contoh penting adalah Deklarasi Manokwari di tanah Papua, yang diluncurkan pada tahun 2018 antara Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Deklarasi ini menyoroti komitmen bersama untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem melalui pengembangan kebijakan dan program pendukung, kemajuan penelitian, dan pariwisata ramah lingkungan.

MEKSIKO

Meksiko merupakan salah satu negara pertama yang mulai menyiapkan visi REDD+, strategi REDD+ nasional, dan proposal pembayaran untuk kinerja yang diajukan ke Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF). Pada tahun 2008, Meksiko mengajukan catatan ide proyek (R-PIN) kepada FCPF, proyek ini diusulkan di lima negara bagian yang mencakup 21% wilayah hutan di Meksiko dimana tingkat deforestasi dan degradasi tertinggi terjadi: Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo dan Yucatán (lima dari tujuh anggota Satuan Tugas GCF). Pada akhir tahun 2018, FCPF memberi wewenang kepada Meksiko untuk maju dalam negosiasi tahap Perjanjian Pembayaran Pengurangan Emisi (ERPA), untuk dapat mulai melaksanakan proyek yang diajukan. Hal ini akan memungkinkan pengujian model intervensi berdasarkan pengelolaan wilayah yang terintegrasi untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, model kinerja pembayaran, dan model pembagian manfaat di antara para pemangku kepentingan lokal di wilayah di mana hasil-hasil tersebut dihasilkan. Sayangnya, dan terlepas dari kemajuan yang telah dicapai, pada bulan Maret 2020, administrasi Pemerintah Federal yang baru menginformasikan kepada FCPF bahwa mereka telah mengambil keputusan untuk tidak menandatangani ERPA karena kurangnya persyaratan. Perubahan arah upaya REDD+ di negara tersebut tidak terduga dan terjadi pada saat anggaran lembaga-lembaga sektor lingkungan hidup Meksiko mencapai titik terendah sepanjang sejarah di tengah pandemi COVID-19, sehingga semakin mempersulit kemungkinan pembiayaan aksi-aksi terencana yang diperlukan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.

Dalam hal ini, bagi para anggota Gugus Tugas GCF di Meksiko, sangatlah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektoral di Meksiko, untuk mencari mekanisme yang memungkinkan mereka mengambil manfaat dari program yang telah dibuat dan bergerak ke tahap yang baru, untuk menemukan peluang baru untuk terus meningkatkan kapasitas dan mengidentifikasi anggaran yang diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti itu.

besarnya. Sejak penyusunan visi REDD+ dan strategi Negara, Satgas GCF telah memainkan peran mendasar di antara para anggotanya. Ketujuh Negara melihat Satgas GCF sebagai sekutu yang telah berkontribusi dalam menjalin persatuan di antara mereka, menghasilkan platform yang kuat yang memungkinkan mereka untuk berhubungan dengan para pelaku di berbagai tingkatan, menjadi referensi dan memiliki kepemimpinan yang diakui di bidang-bidang penting di dalam negeri, serta memposisikan diri mereka di bidang-bidang strategis di tingkat internasional.

PERU

Penambangan ilegal di Peru mempengaruhi Amazon, menghubungkannya dengan kejahatan lain seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pencurian tanah, pembunuhan bayaran, dan lain-lain[68]. Di antara wilayah Amazon yang terkena dampak pertambangan ilegal di Peru adalah Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali dan Madre de Dios, wilayah yang terakhir merupakan wilayah yang paling terdampak. Selain itu, karena sebagian besar merupakan penambangan aluvial, kegiatan ini berdampak pada 22 sungai.[69] Di antara upaya negara untuk mengurangi dampak penambangan ilegal adalah program

[68] Proyecto Prevenir - Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat. (n.d.). https://www.usaid.gov/sites/default/files/2022- 05/Prevent-FS- Spanish-Aug_2021.pdf

[69] "Sebuah desa yang tenggelam": Pertambangan ilegal di sungai yang bersih dan berdampak pada masyarakat setempat - FCDS - yayasan untuk pelestarian dan pembangunan Kolombia. FCDS. (2022, November 18). https://fcds.org.co/prensa/un-pueblo-flotando-la-mineria-ilegal-crece-en-el-rio-pure-y-afec- ta-a-los-pueblos-aislados/

implementasi "Rencana Pemulihan" di wilayah yang teridentifikasi di Puno, Cusco, dan Madre de Dios. Namun, upaya-upaya ini tidak cukup mengingat adanya laporan mengenai penambangan ilegal yang meluas di wilayah tersebut.

Perdagangan narkoba juga merupakan kegiatan ilegal yang mempengaruhi masyarakat adat, yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengekang kegiatan ini di wilayah mereka. Di Amazon, di antara wilayah yang terkena dampaknya adalah San Martín, Ucayali, dan Madre de Dios, dengan kematian yang terkait dengan kegiatan ilegal ini yang dilaporkan oleh para pemimpin Masyarakat Adat dalam 3 tahun terakhir. Sementara itu, pemerintah nasional mengimplementasikan rencana substitusi tanaman untuk mengekang penanaman koka; namun, upaya ini tidak cukup karena Peru pada tahun 2021 terus menjadi produsen koka terbesar kedua secara internasional.[70]

Terima kasih kepada para pendukung dan mitra teknis kami di masa lalu dan saat ini

Prakarsa Iklim dan Lingkungan Internasional Norwegia, Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, Institut Emmett tentang Perubahan Iklim & Lingkungan di UCLA School of Law, Institut Perubahan Iklim & Lingkungan di UCLA School of Law. Lingkungan Hidup di Fakultas Hukum UCLA, Institut Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan UCLA, Institut Ilmu Perilaku Universitas Colorado Boulder, Pusat Getches-Wilkinson Fakultas Hukum Universitas Colorado, Yayasan Gordon dan Betty Moore, Packard Foundation, Climateworks Foundation, Aliansi Iklim dan Tata Guna Lahan (CLUA), Dana Rockefeller Bersaudara, Andes Amazon Fund (AAF), Pakta Inggris, GIZ, KfW, Global Environment Fa- cility, The Climate Group, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Earth Inno- vation Institute (EII), Pronatura Sur, Mecanis- mos de Desarrollo Alternos (MDA), Yayasan Bumi Eka Lestari (BATARI), Naturaleza y Cul- tura Internacional (NCI), FUNBIO, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema), Fundación Natura Boliv- ia, Center for International Forestry Research (CIFOR- ICRAF), Carbon Disclosure Project (CDP), CTrees, AlianzaMX, Forest Trends, Enviromental Defence Fund (EDF), The Nature Conservancy (TNC), International Union for Conservation of Nature (IUCN), Conservation International (CI), Instituto de Pesquisa Am- biental da Amazônia (IPAM), Samdhana Insti tute, Fundação Amazonas Sustentável (FAS), BVRio, Institute for the Conservation and Sus- tainable Development of Amazonas (Idesam), Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU), Ke- mitraan, Tropical Forest Alliance (TFA), Flora and Fauna International, World Wide Fund for Nature (WWF), the Sustainable Trade Initiative (IDH), Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian (FAO), dan masih banyak lagi.

70DEVIDA - Comision Nacional para el Desarollo y la Vida sin Drogas. (n.d.). Tanaman yang dibudidayakan dengan jumlah tanaman koka yang dipantau pada tahun 2021. SISCOD - Sistema de Informacion de Lucha Contra Las Drogas. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3633678/Anexo%20 RPE%20N°%20134-2022-DV-PE.pdf.pdf

GCF
task force

www.gcftf.org